



# APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



---

Sukuk Negara untuk APBN yang Kuat



“Juga dibuat jalur khusus untuk Asian Games, untuk imigrasi tidak bercampur dengan yang lain. Untuk bea cukai juga ada jalur bea cukai yang khusus. Mereka juga melakukan persiapan untuk meng-clearkan barang-barang yang dibawa,”

---

Disampaikan oleh Menteri Keuangan  
di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta,  
Senin 13 Agustus 2018.,”

# CAPAIAN BEBERAPA OUTPUT STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

sampai dengan 31 Juli 2018

## KEMENPUPR

 **195,7** km  
Pembangunan  
Jalan Baru  
(target 811,5 Km)

 **17,7** km  
Pembangunan  
Jalan Tol  
(target 33,1 Km)

 **2674,8**m  
Pembanguna  
Jembatan  
(target 9.708,9 m)

## KEMENHUB

 **3**  
Pembangunan  
Bandara  
(target 4 bandara)

 **236,2**km'sp  
Pembangunan  
Rel KA  
(target 366 Km'sp)

## BNN

 **1.373** kasus  
Deteksi dini  
Penyalahgunaan  
Narkoba di Instansi  
Pemerintah  
(target 25 ribu kasus)

 **403**  
Berkas Perkara Tindak  
Pidana Narkotika  
(target 684 berkas)

 **16**  
Berkas Perkara TPPU  
Hasil Tindak Pidana  
Narkotika dan  
Prekursor Narkotika  
(target 46 berkas)

## KEMENDIKBUD

 **11,8**jt siswa  
Penyaluran KIP  
(target 11,8 juta siswa)

 **13,31**ribu  
Rehab/bangun  
ruang kelas  
(target 24,7 ribu)

## KEMENAG

 **401.193\*** siswa  
Penyaluran KIP  
(target 11,8 juta siswa)

 **4,5**jt siswa  
Penyaluran BOS  
(target 8,7 juta siswa)

 **11.147** mahasiswa  
Penyaluran Bidik  
Misi (target 31.000  
mahasiswa)

## KEMENSOS

 **9,9**jt  
Penyaluran Program  
Keluarga Harapan  
(target 10,0 juta  
Keluarga Penerima  
Manfaat)

 **15,2**jt  
Bantuan Pangan  
(target 15,6 juta)

## KEMENKES

 **92,3**jt jiwa  
Penyaluran JKN-KIS  
(target 92,3 juta  
jiwa)

## KEMENRISTEKDIKTI

 **92,3** juta  
Penyaluran Bidik  
Misi (mahasiswa)  
(target 92,4 juta  
mahasiswa)

\*) adanya perubahan mekanisme penyaluran yang membuat penyerapan lebih rendah

# RINGKASAN EKSEKUTIF

**K**inerja Perekonomian Indonesia pada semester pertama tahun 2018 terus memperlihatkan tren

**penguatan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh peningkatan pengeluaran konsumsi dengan diiringi tingkat inflasi yang tetap terjaga.** Pertumbuhan Q2 2018 mencapai 5,27 persen tertinggi sejak tahun 2014 setelah memasuki masa konsolidasi pasca *commodity boom* pada tahun 2015-2016. Dari sisi produksi, kinerja PDB ditopang oleh sektor-sektor utama antara lain sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Konstruksi, dan Jasa-jasa. Kedepan, perekonomian nasional masih harus menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan berlanjut di 2018, namun dibayangi oleh proteksionisme dan perang dagang yang dapat mengakibatkan proyeksi pertumbuhan volume perdagangan direvisi ke bawah. Dalam menjaga stabilitas nilai tukar, laju inflasi yang rendah, dan defisit transaksi berjalan pada level yang aman, Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan diperlukan dalam menjalankan bauran kebijakan guna

dengan memprioritaskan stabilitas ekonomi makro jangka pendek tetapi tetap mendorong pertumbuhan jangka menengah.

**Memasuki awal semester II tahun 2018, realisasi penerimaan pendapatan negara dan hibah hingga 31 Juli 2018 telah mencapai Rp994,36 triliun, atau 52,48 persen dari target penerimaan pendapatan negara dan hibah pada APBN 2018. Angka realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan akhir Juli 2018 terkumpul sebesar Rp780,05 triliun, PNBPN sebesar Rp211,04 triliun, dan hibah sebesar Rp3,27 triliun atau masing-masing telah mencapai 48,21 persen, 76,62 persen, dan 273,22 persen dari target yang ditetapkan pada APBN 2018.** Ditilik dari pertumbuhannya secara *year-on-year (yoy)*, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBPN hingga akhir Juli 2018 tumbuh berturut-turut 14,60 persen dan 22,53 persen.

**Sampai dengan akhir Juli 2018, realisasi komponen penerimaan perpajakan hingga akhir Juli 2018, yang berasal dari penerimaan**

**pajak mencapai Rp687,17 triliun dan capaian sebesar Rp92,88 triliun berasal dari penerimaan kepabeanan dan cukai. Realisasi penerimaan dari pajak telah mencapai 48,26 persen dari target penerimaan pada APBN 2018, sedangkan realisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai berhasil mencapai 47,85 persen dari target pada APBN 2018.** Sampai dengan 31 Juli 2018, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar 14,36 persen secara *yoy*. Jika tanpa memperhitungkan penerimaan *tax amnesty* pada tahun 2017, maka penerimaan pajak tercatat tumbuh 16,69 persen (*yoy*), yang didukung oleh kinerja positif dari penerimaan PPh non migas, PPh migas, serta penerimaan PPN dan PPnBM. Selain itu, sampai dengan 31 Juli 2018 realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai juga masih terus tumbuh positif mencapai 16,39 persen secara *yoy*, dimana pertumbuhan positif kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut berasal dari penerimaan cukai, bea masuk, dan bea keluar.

**Secara lebih rinci, penerimaan PPh non migas masih tumbuh sebesar 14,44 persen secara *yoy*. Pertumbuhan penerimaan PPh non migas masih didominasi oleh penerimaan PPh 22 Impor, PPh pasal 25/29 Badan, dan PPh pasal 25/29 OP, ketiga komponen penerimaan PPh non migas tersebut masing-masing tumbuh**

**mencapai 28,32 persen (*yoy*), 23,28 persen (*yoy*), dan 20,52 secara *yoy*.** Selain itu, pertumbuhan penerimaan PPh non migas juga didukung oleh kinerja positif jenis pajak utama lainnya, yaitu PPh 21 dan PPN Impor, dimana berturut-turut tumbuh 16,13 persen (*yoy*) dan 27,46 persen (*yoy*). Efek positif hari raya dan peningkatan konsumsi masyarakat menjadi faktor pendorong kinerja positif dari pertumbuhan komponen PPh non migas. **Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM hingga akhir Juli 2018, tumbuh mencapai 14,26 persen secara *yoy* didorong oleh pertumbuhan konsumsi dalam negeri dan kinerja impor.** Komponen penerimaan PPN dan PPnBM juga masih tumbuh secara positif, kecuali PPnBM DN, dimana hingga akhir Juli 2018 masih tumbuh negatif 9,38 persen (*yoy*), sebagai akibat tagihan restitusi yang cukup besar. Sedangkan penerimaan PPh migas hingga akhir Juli 2018 mampu tumbuh positif yaitu sebesar 14,21 persen secara *yoy*. Pertumbuhan penerimaan PPh migas ditopang oleh meningkatnya harga ICP.

**Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Juli 2018, masih tetap tumbuh tertinggi sejak 2015, karena disokong oleh pertumbuhan yang berasal dari komponen penerimaan cukai sebesar 14,21 persen (*yoy*), penerimaan bea masuk tumbuh mencapai 14,61 persen (*yoy*), dan**

**pertumbuhan tertinggi berasal dari komponen penerimaan bea keluar yang mencapai 98,95 persen (*yoy*).** Aktivitas perdagangan internasional dan harga komoditas yang membaik, serta dampak positif implementasi kebijakan melalui penertiban kegiatan impor dan cukai berisiko tinggi (PIBT dan PCBT), masih menjadi faktor yang mendorong peningkatan pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Juli 2018. Secara lebih rinci, pertumbuhan penerimaan CHT yang mencapai 13,87persen secara *yoy*, masih mendominasi pertumbuhan total penerimaan cukai. Penerimaan CHT didukung oleh faktor pertumbuhan positif pada produk hasil tembakau dan kenaikan tarif efektif pada CHT. Sedangkan produksi MMEA dalam negeri yang meningkat, turut menjadi faktor tambahan pendorong pertumbuhan penerimaan cukai. Sementara itu, penerimaan BM hingga akhir Juli 2018 masih juga tercatat sebagai yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhannya didukung oleh peningkatan impor sebesar 8,58 persen dan dampak positif program PIBT. Peningkatan impor berupa bahan baku/penolong serta barang modal mengindikasikan bergesernya aktivitas produksi dalam negeri. Sedangkan penerimaan BK hingga akhir Juli 2018 terus menunjukkan kinerja sangat positif, yang didorong oleh aktivitas ekspor komoditas minerba yang tumbuh lebih dari 150 persen. Faktor

pendorong kinerja ekspor komoditas antara lain karena permintaan mitra dagang utama Indonesia yang meningkat.

**Realisasi PNBP sampai dengan 31 Juli 2018 mencapai Rp211,04 triliun atau mencapai 76,62 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp275,43 triliun.** Capaian Realisasi PNBP ini mengalami pertumbuhan sebesar 22,53 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya penerimaan Sumber Daya Alam karena masih berlanjutnya kenaikan harga komoditas minyak bumi dan batu bara sepanjang periode Januari-Juli 2018. Realisasi penerimaan SDA Migas tumbuh sebesar 50,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan SDA Migas tersebut terutama disebabkan adanya tren peningkatan harga ICP. Sampai dengan 31 Juli 2018, rata-rata harga ICP tercatat sebesar US\$67,17/barel. Sementara itu, realisasi penerimaan SDA Non Migas mencapai Rp19,68 triliun atau 84,39 persen terhadap APBN 2018 atau mampu tumbuh sebesar 28,28 persen dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2017. Peningkatan kenaikan rata-rata harga batubara acuan (HBA) pada periode Januari-Juli 2018 yang mencapai US\$97,66 per ton, lebih tinggi dibandingkan HBA periode Januari-Juli 2017 sebesar US\$81,74 per ton merupakan salah satu faktor utama

peningkatan realisasi penerimaan SDA Non Migas tersebut. Penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan sampai dengan Juli 2018 mencapai Rp38,08 triliun atau 85,20 persen dari target APBN 2018. Pada periode yang sama, PNBPN Lainnya telah mencapai 65,60 persen dari target APBN 2018. Sementara itu, pendapatan BLU mencapai sebesar Rp25,67 triliun, atau 59,28 persen dari target APBN 2018 atau tumbuh sebesar 15,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sumber pendapatan utama BLU antara lain berasal dari pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat antara lain pendapatan jasa pelayanan rumah sakit dan pendidikan, pengelolaan dana khusus untuk masyarakat terutama pendapatan dana perkebunan kelapa sawit, dan pendapatan jasa layanan perbankan BLU.

**Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juli 2018 sebesar Rp1.145,66 triliun, mencapai sekitar 51,6 persen dari pagu APBN, atau meningkat 7,7 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.** Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp697,02 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp448,64 triliun. Pemerintah terus mendorong upaya perbaikan kinerja penyerapan anggaran agar pelaksanaan APBN

dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Upaya perbaikan tersebut tercermin antara lain dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga bulan Juli 2018 yang tumbuh 15,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi Subsidi yang sudah mencapai Rp91,26 triliun (tumbuh 34,5 persen) dan Belanja Bantuan Sosial mencapai Rp56,24 triliun (tumbuh 75,8 persen). Realisasi belanja subsidi mencapai Rp91,26 triliun atau 58,41 persen dari pagu alokasi APBN 2018, terdiri atas subsidi energi Rp71,01 triliun dan subsidi non energi Rp20,25 triliun. Lebih tingginya realisasi belanja subsidi sampai dengan bulan Juli 2018 tersebut dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah (kurs), serta pembayaran sebagian kurang bayar belanja subsidi tahun-tahun sebelumnya sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam menjaga *good governance* dan kinerja keuangan BUMN. Pemerintah akan secara konsisten menjaga alokasi kebutuhan subsidi yang disesuaikan dengan pergerakan parameter dan asumsi makro APBN dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara.

**Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Juli 2018 telah mencapai Rp448,64**

**triliun atau 58,6 persen dari pagu APBN 2018,** yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp412,77 triliun (58,5 persen) dan Dana Desa Rp35,86 triliun (59,8 persen). Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp401,52 triliun (59,3 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp4,43 triliun (52,2 persen), serta Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp6,82 triliun (32,4 persen). Realisasi TKD sampai dengan Juli 2018 tersebut lebih rendah Rp10,48 triliun atau sekitar 2,48 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2017. Lebih rendahnya realisasi TKD sampai dengan Juli 2018 terutama disebabkan oleh: (1) lebih rendahnya realisasi DAK Fisik karena sebagian dapat memenuhi persyaratan penyaluran tahap I, sesuai yang telah diamanatkan dalam PMK 112/PMK.07/2017 mengenai Pengelolaan TKDD bahwa penyaluran DAK Fisik Tahap I sebesar 25 persen dapat dilakukan paling lambat bulan Juli; (2) lebih rendahnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) karena adanya perubahan pola penyaluran DBH di Triwulan I Tahun 2018 yang semula 25 persen dari pagu pada tahun 2017 menjadi 20 persen dari pagu pada tahun 2018, dan adanya pembayaran kurang bayar tahun 2015 pada bulan Februari 2017. Sementara itu, realisasi Dana Desa sampai dengan Juli 2018 sedikit lebih tinggi Rp21,6 miliar (0,06 persen) dibandingkan realisasi Dana

Desa pada periode yang sama tahun 2017. Hal tersebut dipengaruhi oleh percepatan penyaluran Dana Desa yang telah dilakukan sejak awal tahun 2018 dalam mendukung pelaksanaan program padat karya tunai di Desa.

**Keberlanjutan fiskal di tahun 2018 diharapkan akan tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga Juli 2018 mencapai Rp151,30 triliun atau sekitar 1,02 persen PDB.**

Realisasi defisit tersebut lebih rendah dari realisasi defisit di periode tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah yang senantiasa menjaga pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Sementara itu, realisasi pembiayaan yang dilakukan Pemerintah hingga Juli 2018 mencapai Rp206,60 triliun, terutama bersumber dari pembiayaan utang yaitu sebesar Rp205,57 triliun, atau mencapai 51,5 persen dari APBN 2018. Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp221,94 triliun atau mencapai 53,5 persen dari APBN 2018 dan pinjaman (neto) sebesar negatif Rp16,37 triliun atau sekitar 107,0 persen dari rencana Pemerintah di tahun 2018. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk senantiasa melakukan pengelolaan utang yang *prudent*.

# REALISASI APBN 2018 S/D 31 JULI 2018

	APBN 2018	Realisasi s.d. 31 Juli 2018	% thd APBN
 <b>PENDAPATAN NEGARA (A)</b>	1.894,7	994,4	52,5%
 <b>BELANJA NEGARA (B)</b>	2.220,7	1.145,7	51,6%
 <b>KESEIMBANGAN PRIMER</b>	(87,3)	(4,9)	5,6%
 <b>SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)</b>	(325,9)	(151,3)	46,4
 <b>PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	325,9	206,6	63,4

dalam miliar Rupiah

Sampai dengan 31 Juli 2018 realisasi pendapatan negara mencapai 52,48 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018 atau tumbuh 16,46 persen, lebih baik capaiannya dibandingkan realisasi pendapatan Negara tahun 2017 yang mencapai 49,18 persen dari targetnya.

Selanjutnya, realisasi Belanja Negara tahun 2018 juga menunjukkan daya serap yang lebih baik, dimana penyerapan belanjanya mencapai 51,59 persen terhadap pagunya (tumbuh 7,69 persen), lebih tinggi dibandingkan penyerapan tahun 2017 untuk periode yang sama (49,87 persen terhadap pagunya). Dengan komposisi capaian pendapatan negara dan belanja negara yang lebih baik sampai dengan 31 Juli 2018, realisasi defisit anggaran mencapai Rp151,30 triliun atau 1,02 persen dari PDB, jauh lebih baik dari capaian pada periode yang sama dalam tahun 2017 yang sebesar Rp210,04 triliun atau 1,55 persen dari PDB.

Secara singkat, realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 Juli 2018 sebagai berikut:

- Laju realisasi penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 14,60 persen atau mencapai Rp780,05 triliun (48,21 persen dari target APBN 2018) terutama bersumber dari:
- Penerimaan Pajak yang tumbuh sebesar 14,36 persen dengan capaian sebesar Rp687,17 triliun atau 48,26 persen dari target APBN tahun 2018.

- Penerimaan bea dan cukai tumbuh sebesar 16,39 persen dengan capaian sebesar Rp92,88 triliun atau 47,85 persen dari target APBN tahun 2018.
- Pertumbuhan realisasi PNPB juga menunjukkan nilai yang sangat positif sebesar 22,53 persen yang mampu membukukan nilai realisasi sebesar Rp211,04 triliun atau 76,62 persen dari target APBN tahun 2018.

Selanjutnya, untuk kinerja belanja negara sampai dengan 31 Juli 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

- Belanja pemerintah pusat tumbuh 15,26 persen, dengan capaian Rp697,02 triliun atau 47,92 persen dari pagu APBN tahun 2018.
- Sedangkan Transfer ke daerah dan dana desa sedikit mengalami penurunan sebesar 2,28 persen dengan capaian Rp448,64 triliun atau 58,56 persen dari pagu APBN tahun 2018.

Dengan gambaran fiskal tersebut, maka kinerja positif realisasi APBN 2018 masih terjaga sampai dengan 31 Juli 2018. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan realisasi defisit anggaran sebesar 1,02% terhadap PDB atau Rp151,30 triliun (keseimbangan primer negatif Rp4,85 triliun), turun dibandingkan defisit anggaran periode yang sama tahun 2017 yakni 1,55% terhadap PDB atau Rp210,04 triliun (keseimbangan primer sebesar negatif Rp79,15 triliun). Dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp206,60 triliun, terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp55,30 triliun.

# PERKEMBANGAN MAKROEKONOMI

**P**erekonomian Indonesia pada semester pertama tahun 2018 melanjutkan tren penguatan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan aktivitas pemulihan perekonomian global. Realisasi pertumbuhan ekonomi semester pertama tahun 2018 sebesar 5,17 persen tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 5,01 persen. Pertumbuhan yang cukup tinggi pada triwulan II tahun 2018 yang sebesar 5,27 persen turut mendorong kinerja pertumbuhan semester I yang diantaranya didorong oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan Pemerintah yang cukup tinggi. Kinerja tersebut secara umum melebihi ekspektasi dan perkiraan konsensus. Adapun pendorong kinerja pertumbuhan tersebut terutama bersumber dari konsumsi masyarakat yang meningkat terutama di saat momentum liburan hari raya Idul Fitri yang bersamaan dengan libur panjang tahun ajaran sekolah. Sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat, sektor produksi yang tumbuh baik juga merupakan sektor-sektor untuk memenuhi permintaan pada hari raya Idul Fitri seperti sektor perdagangan (ritel), serta jasa transportasi dan pergudangan.

Sepanjang semester I 2018, seluruh komponen dari sisi pengeluaran mengalami peningkatan pertumbuhan dengan motor penggerak utama pada sisi konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Selain itu, konsumsi pemerintah juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada semester I 2018 yaitu tumbuh sebesar 4,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 0,04 persen. Dari sisi perdagangan internasional, pertumbuhan impor yang lebih tinggi dari ekspor didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku pendukung infrastruktur,

seperti traktor, bulldozer, crane, besi baja dimana mengindikasikan peningkatan gairah aktivitas investasi dan perdagangan di Indonesia. Dari sisi produksi, seluruh sektor mampu tumbuh positif pada semester I 2018. Kinerja pertumbuhan ditopang oleh sektor-sektor kunci seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi serta jasa-jasa.

**Stabilitas ekonomi Indonesia terjaga cukup baik yang tercermin pada stabilitas tingkat harga domestik walaupun terjadi tekanan depresiasi nilai tukar.** Selama bulan Januari hingga Juli tahun 2018, tingkat inflasi dapat dijaga pada kisaran sasaran inflasi 3,5 persen. Pada bulan Juli 2018, laju inflasi tercatat sebesar 3,18 persen (yoy) sehingga secara kumulatif inflasi hingga Juli 2018 mencapai 2,18 persen (ytd). Realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017, yaitu sebesar 2,60 persen (ytd) atau 3,88 persen (yoy). Terjaganya laju inflasi tersebut didukung oleh rendahnya inflasi inti dan melambatnya inflasi komponen *administered price* di tengah meningkatnya inflasi *volatile food*. Laju inflasi bulan ini terutama dipengaruhi peningkatan harga bahan makanan

seperti telur dan daging ayam ras, biaya sekolah karena masuknya tahun ajaran baru, dan penyesuaian BBM nonsubsidi (Pertamax series). Di sisi lain, terjadi deflasi yang cukup dalam pada tarif angkutan seiring normalisasi permintaan pasca lebaran dan libur panjang serta penurunan harga bawang dan cabai merah karena telah masuk masa panen. Pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan laju inflasi, khususnya dengan menjaga ketersediaan pasokan dan upaya stabilisasi harga, meskipun dibayangi risiko volatilitas Rupiah dan meningkatnya harga komoditas global yang berpotensi meningkatkan ekspektasi inflasi masyarakat.

**Hingga Akhir Juli 2018 rata-rata nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS tercatat sebesar Rp13.880/USD.** Kebijakan fiskal dan moneter Amerika Serikat, serta sentimen penerapan kebijakan proteksionisme menyebabkan mata uang negara-negara di dunia mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat, termasuk Rupiah. Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, terus memperkuat koordinasi dalam menjalankan bauran kebijakan dengan memprioritaskan stabilitas ekonomi makro jangka pendek tetapi tetap mendorong pertumbuhan jangka menengah. Sejalan dengan pergerakan nilai tukar yang fluktuatif, hingga bulan Juli 2018 terdapat peningkatan suku bunga dalam negeri khususnya suku bunga SPN 3 bulan dengan rata-rata mencapai 4,57 persen lebih rendah dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,07 persen. Hal ini terutama didukung oleh sentimen positif dari faktor domestik seperti kuatnya fundamental ekonomi yang ditunjukkan oleh perbaikan peringkat utang Indonesia serta terkendalinya inflasi domestik.

**Harga minyak mentah dunia menunjukkan tren meningkat sejalan dengan perkembangan harga komoditas global.** Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price / ICP*) yang mengacu harga minyak mentah utama dunia jenis Brent, juga mengalami peningkatan. Potensi risiko geopolitik yang muncul dari ketegangan hubungan Amerika Serikat dan Iran serta gangguan produksi di Venezuela masih menjadi faktor utama pendorong lonjakan harga minyak mentah pada periode ini. Berdasarkan perkembangan tersebut, rata-rata ICP bulan Juli mencapai USD 70,68 per barel, sehingga rata-rata Januari-Juli 2018 tercatat sebesar USD 67,14 per barel. Peningkatan harga minyak ini akan memberikan dampak positif terhadap kinerja penerimaan migas.

**Menyikapi perkembangan ekonomi global, Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan terus berkoordinasi dan meningkatkan kewaspadaan serta siap mengambil kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pembangunan.** Dalam jangka pendek, fokus koordinasi kebijakan diprioritaskan pada memperkuat stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional terhadap tekanan global, yaitu pada stabilitas nilai tukar Rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat, dan defisit transaksi berjalan yang aman. Hal ini ditempuh melalui penguatan bauran kebijakan moneter Bank Indonesia, kebijakan fiskal oleh Kementerian Keuangan, ketersediaan bahan pokok strategis, dan juga penguatan pengawasan lembaga keuangan oleh OJK, serta peningkatan pemantauan dan perkembangan DPK oleh LPS. Sementara itu, implementasi kebijakan reformasi struktural di sektor riil terus dipercepat, seperti peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

# SATU DASAWARSA SUKUK NEGARA

Sejak tahun 2008 atau setelah disahkannya UU No.19 Tahun 2008 pada tanggal 7 Mei 2008, Pemerintah mulai menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN / Sukuk Negara) sebagai upaya diversifikasi sumber pembiayaan APBN. Melalui penerbitan Sukuk Negara, Pemerintah dapat menyediakan instrumen keuangan berbasis syariah yang aman dan kredibel, yang dibutuhkan oleh industri keuangan syariah maupun investor individu yang memiliki *concern* dengan kesyariahan instrumen keuangan. Penerbitan Sukuk Negara ini merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam mendukung pengembangan pasar keuangan syariah di tanah air.

Kini, Sukuk Negara telah memasuki usia yang ke-sepuluh tahun (2008-2018) atau Satu Dasawarsa. Selama Satu Dasawarsa penerbitannya, Sukuk Negara semakin memainkan peran penting dalam membiayai APBN, menyediakan instrumen investasi syariah bagi masyarakat, serta membiayai pembangunan berbagai proyek infrastruktur di tanah air. Di samping itu, juga telah dilakukan berbagai inovasi dan capaian dalam rangka penerbitan dan pengelolaan Sukuk Negara, baik berupa variasi jenis instrumen, jenis struktur akad

syariah, diversifikasi *underlying asset*, pengembangan pasar, pengelolaan transaksi, maupun berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

## Berikut *highlight* capaian Sukuk Negara selama satu dasawarsa:

### 1. Pembiayaan APBN

Sukuk Negara pertama kali diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2008. Dalam kurun waktu 2008 s.d 31 Juli 2018, **total penerbitan Sukuk Negara telah mencapai Rp911,9 triliun** dengan total *outstanding* sebesar Rp625,2 triliun. Proporsi jumlah *outstanding* Sukuk Negara tersebut mencapai 18% dari total *outstanding* Surat Berharga Negara secara keseluruhan.

### 2. Pengembangan instrumen dan metode penerbitan

Hingga saat ini telah dikembangkan tujuh jenis instrumen Sukuk Negara yang diterbitkan di pasar domestik maupun global, dan ditujukan baik untuk investor institusi maupun individu, yang terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S), *Islamic Fixed Rate* (IFR), *Project Based Sukuk* (PBS), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Sukuk Negara Indonesia (SNI), Sukuk Negara Ritel (SR), dan Sukuk Tabungan (ST). Metode

penerbitan Sukuk Negara seperti lelang, *bookbuilding*, dan *private placement* juga telah dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan pendanaan APBN sekaligus kebutuhan investasi dari para investor.

### 3. Pengembangan struktur akad dan *underlying asset*

Sebagai upaya untuk mendukung pengelolaan Sukuk Negara sekaligus menyediakan *benchmark* bagi industri keuangan syariah dalam negeri, telah dikembangkan empat jenis struktur akad syariah, yaitu *Ijarah Sale and Lease Back*, *Ijarah Asset to be Leased*, *Ijarah Al-Khadamat*, dan *Wakalah* berikut *underlying asset* yang mendasarinya yaitu berupa Barang Milik Negara, proyek-proyek Pemerintah, serta jasa. Struktur akad dan *underlying asset* tersebut telah memperoleh Fatwa serta opini syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hingga saat ini, telah terdapat enam Fatwa dan satu ketetapan DSN-MUI, serta opini syariah untuk setiap penerbitan Sukuk Negara.

### 4. Pembiayaan proyek melalui Sukuk Negara

Sejak tahun 2013, mulai dikembangkan Sukuk Negara yang digunakan (*earmarked*) untuk

pembiayaan proyek yaitu *Project Financing Sukuk* (Sukuk Proyek). Pembiayaan proyek melalui penerbitan Sukuk Negara digunakan dalam rangka untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, dan pembangunan lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah.

Dalam kurun waktu 2013 s.d 2018, total alokasi Sukuk Proyek telah mencapai Rp62,46 Triliun dengan jumlah proyek sebanyak 1.592 proyek yang tersebar di 34 provinsi. Proyek yang dibiayai melalui Sukuk Proyek mencakup:

- pembangunan jalan, *underpass* dan jembatan di 30 provinsi (sebanyak 339 proyek);
- pembangunan dan revitalisasi jalur kereta api dan stasiun di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi;
- pembangunan 332 proyek sumber daya air (bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah);
- pembangunan dan pengembangan Gedung Perkuliahan di 54 perguruan tinggi (sebanyak 98 proyek);

- pengembangan dan revitalisasi Asrama Haji di 24 lokasi (sebanyak 40 proyek);
- pembangunan & rehabilitasi 701 Kantor Urusan Agama & Manasik Haji;
- pembangunan 3 Taman Nasional (Baluran, Gunung Gede Pangrango, Aketajawe-Lolobata/Halmahera);
- pembangunan dan pengembangan 32 Madrasah; serta
- pembangunan dan pengembangan 3 Laboratorium.

### 5. Sukuk Negara untuk investor individu

Pemerintah juga secara reguler menerbitkan Sukuk Negara untuk investor individu, yaitu Sukuk Ritel mulai tahun 2009 dan Sukuk Tabungan pada tahun 2016. Selain ditujukan untuk pembiayaan APBN termasuk pembangunan proyek infrastruktur, penerbitan ini juga bertujuan sebagai upaya menyediakan instrumen inklusi finansial dan investasi syariah bagi masyarakat, mewujudkan transformasi masyarakat menuju *investment-oriented society*, sekaligus perluasan basis investor di pasar domestik.

Selama satu dasawarsa, telah diterbitkan sepuluh seri Sukuk Ritel dan satu seri Sukuk Tabungan. **Total penerbitan Sukuk Ritel mencapai Rp144,7 triliun, dengan jumlah investor sebanyak 243.364 orang** yang meliputi 34 provinsi di tanah air. Sedangkan, penerbitan Sukuk Tabungan mencapai Rp2,6 triliun dengan jumlah investor sebanyak 11.338 orang dan rata-rata nominal investasi mencapai Rp228 juta per investor. Hal tersebut merupakan capaian yang luar biasa dan menunjukkan respon yang baik dan tingginya minat masyarakat terhadap instrumen ritel ini.

### 6. Sukuk Negara di pasar global

Sejak tahun 2009, Pemerintah secara reguler menerbitkan Sukuk Negara di pasar internasional dalam denominasi US Dollar (Sukuk Global). Kini, Indonesia tercatat sebagai negara penerbit *international sovereign sukuk* terbesar di dunia dengan total penerbitan mencapai USD16,15 miliar. Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang memiliki peranan penting dalam perkembangan pasar

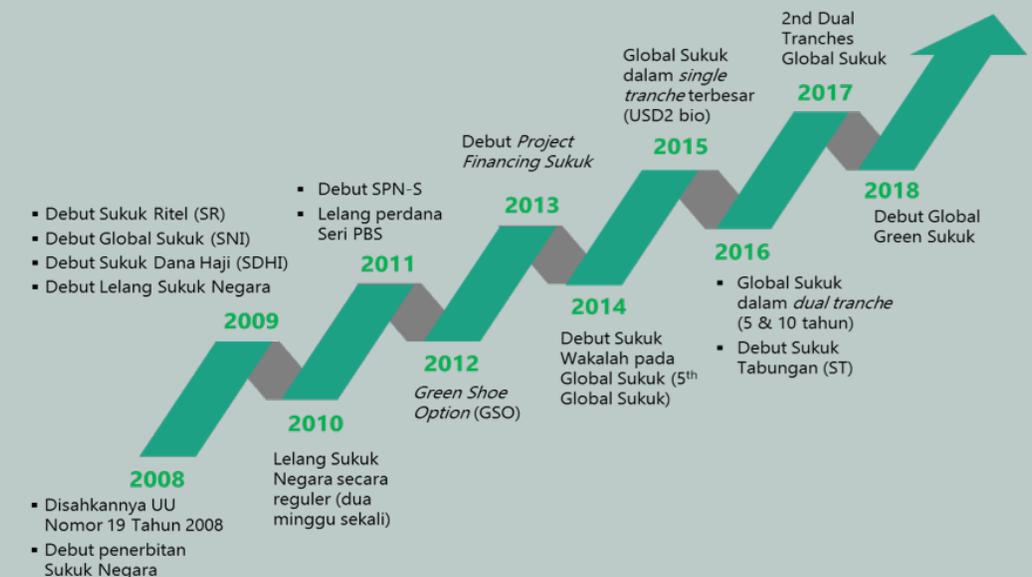
sukuk global dengan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total aset sukuk di pasar global.

Inovasi di pasar global juga dilakukan antara lain dengan menerbitkan Green Sukuk. Pada bulan Maret tahun 2018, Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan *Global Sovereign Green Sukuk* sebesar USD1,25 miliar untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan serta menanggulangi dampak perubahan iklim. Ini merupakan penerbitan Green Sukuk pertama yang dilakukan oleh negara (***The world's first Sovereign Green Sukuk***). Selain berhasil menghadirkan 29% *new green investor*, penerbitan ini juga memberikan sinyal dukungan Indonesia terhadap pasar *Green Bond* dan *Green Sukuk* juga diharapkan dapat menjadi katalis untuk semakin banyaknya penerbitan *Green Bond* dan *Green Sukuk*.

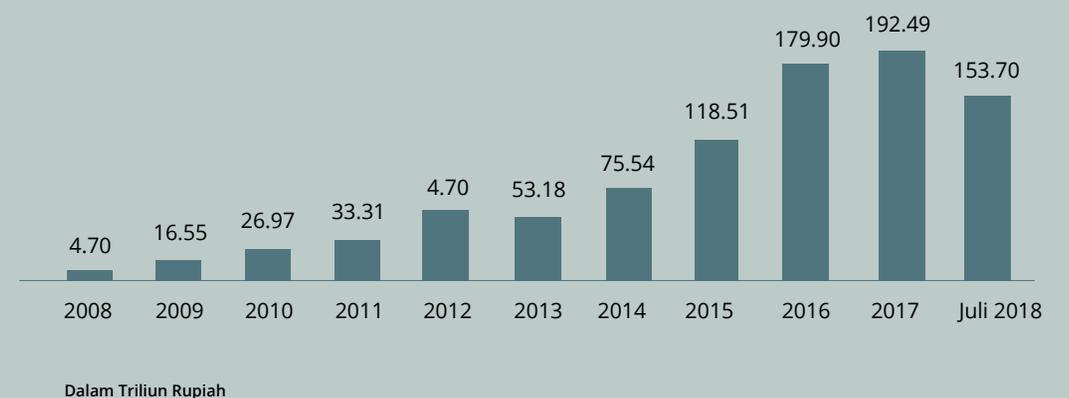
### 7. Penghargaan internasional

Selama satu dasawarsa, penerbitan dan pengelolaan Sukuk Negara telah diakui dunia dan mendapatkan **27 penghargaan** bertaraf internasional dari berbagai lembaga, antara lain Alpha Southeast Asia, The Asset, Finance Asia, Credit Magazine, Asia Money, IFR Asia, Islamic Finance News, Euromoney Islamic Finance Awards, serta Global Islamic Finance Awards. Selain menunjukkan apresiasi dan pengakuan dunia internasional terhadap kredibilitas pengelolaan Sukuk Negara, ini juga sekaligus membuktikan semakin pentingnya peran dan kiprah Indonesia di kancah keuangan syariah global.

## Milestone Sukuk Negara 2008 - 2018



## Total Penerbitan Sukuk Negara 2008 - 31 Juli 2018



## Sukuk Proyek Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

Pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari pasar keuangan melalui instrumen Surat Berharga Negara yang berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak tahun 2008.

Dari tahun ke tahun, pembiayaan proyek melalui SBSN menunjukkan angka yang semakin meningkat, baik dari jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang di bangun, maupun sebaran satker pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan. Sebagai gambaran pada tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 proyek-proyek yang dibiayai melalui SBSN tersebut berturut turut sebesar Rp1,57 triliun, Rp7,13 triliun, Rp13,67 Triliun, dan Rp16,76 Triliun.

Adapun pada tahun anggaran 2018, nilai pembiayaan proyek SBSN tersebut meningkat menjadi Rp22,53 triliun, yang terdiri dari 587 proyek yang tersebar di 34 provinsi pada 7 K/L, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan Kementerian PUPR, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Badan Standardisasi Nasional, dengan rincian berikut:

1. 15 proyek infrastruktur perkeretaapian pada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub dengan nilai Rp7,00 Triliun,
2. 101 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kemen PU-PR dengan nilai pembiayaan Rp7,50 triliun,
3. 144 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan pada Ditjen

Sumber Daya Air Kemen PU-PR dengan nilai pembiayaan Rp5,28 triliun

4. 8 proyek embarkasi haji di Ditjen Pengelolaan Haji dan Umrah Kemenag senilai Rp350 miliar,
5. 34 pembangunan sarana dan fasilitas gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan 32 madrasah di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag senilai Rp1,50 triliun,
6. 245 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag senilai Rp355 miliar,
7. 3 proyek pembangunan taman nasional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp51 miliar'
8. 2 proyek pengembangan gedung perguruan tinggi di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi senilai Rp315 miliar,
9. 1 proyek pengembangan laboratorium di Badan Standardisasi Nasional senilai Rp50 miliar,
10. 2 proyek pembangunan laboratorium di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia senilai Rp120 miliar.

## Beberapa Contoh Proyek Yang Dibiayai Oleh Skuk Proyek



IAIN Salatiga



IAIN Surakarta



Double Track Cirebon Kroya

# PENERIMAAN PAJAK

Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak- 2018 terus berlanjut: Pertumbuhan Penerimaan Pajak Januari s.d. Juli 2018 Mencapai 16,69 persen (di luar Tax Amnesty)

Pertumbuhan (y-o-y) Bulan Januari - Juli 2015-2018



**R**ealisasi penerimaan pajak untuk periode Januari s.d. Juli 2018 tercatat sebesar Rp687,17 triliun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, capaian ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 14,36 persen secara *year-on-year*. Apabila penerimaan uang tebusan dari program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty/TA*) yang sifatnya tidak berulang (*one-off*) selama bulan Januari - Maret 2017 sebesar Rp12,03 triliun tidak dimasukkan dalam penghitungan pertumbuhan, realisasi penerimaan periode Januari s.d. Juli 2018

(dalam triliun Rupiah)

Realisasi Penerimaan Pajak s/d 31 Juli 2018

Uraian	APBN 2018	Realisasi s/d 31 Juli 2018		
		Rp	Δ% 2017 - 2018	% thd APBN
Pajak Penghasilan	855,13	420,56	14,42	49,18
- Migas	38,13	36,16	14,21	94,84
- Non Migas	817,00	384,40	14,44	47,05
PPN & PPnBM	541,80	261,30	14,26	48,23
PBB & Pajak Lainnya	27,06	5,31	14,48	19,62
<b>Jumlah</b>	<b>1.424,00</b>	<b>687,17</b>	<b>14,36</b>	<b>48,26</b>

mengalami pertumbuhan sebesar 16,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Pertumbuhan positif ini ditopang oleh pertumbuhan PPh Non Migas sebesar 14,44 persen, PPh Migas sebesar 14,21persen, PPN dan PPnBM sebesar 14,26 persen, serta PBB & Pajak Lainnya yang tumbuh sebesar 14,48 persen.

Secara umum pertumbuhan penerimaan pajak sampai dengan Juli 2018 ditopang oleh jenis-jenis penerimaan pajak yang berasal dari aktivitas impor dan produksi. Pertumbuhan penerimaan beberapa jenis pajak utama, seperti PPh Pasal 21, PPh Badan, PPh Final, PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor, serta PPN Dalam Negeri merupakan cerminan kondisi perekonomian Indonesia yang tumbuh sebesar 5,06 persen pada Triwulan I-2018 dan meningkat menjadi 5,27 persen pada Triwulan II-2018.

Pertumbuhan Pajak Berdasarkan Jenis

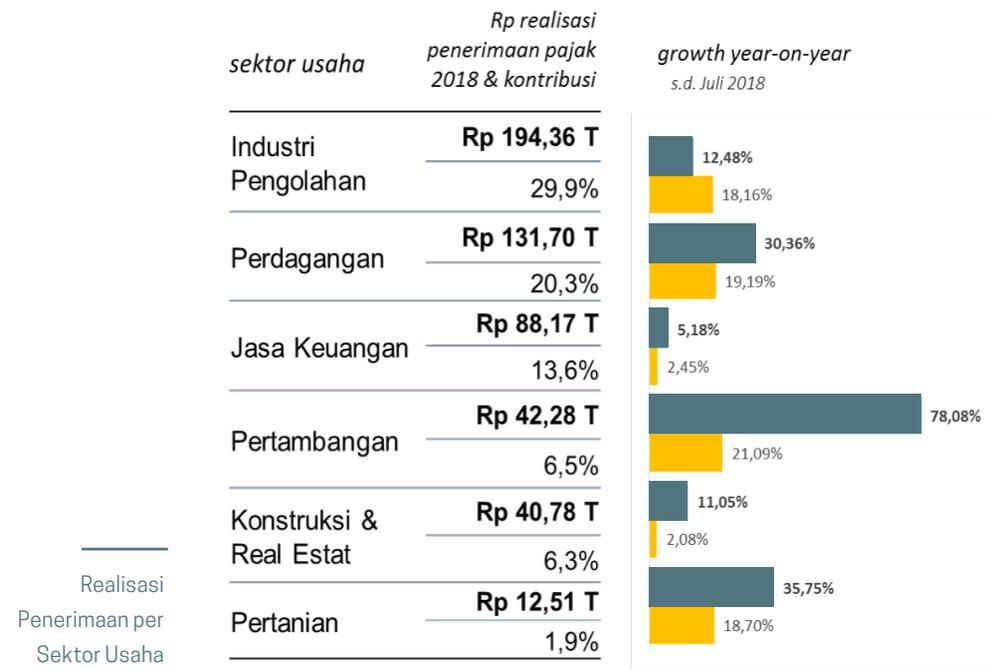
Beberapa jenis pajak bahkan mencatatkan pertumbuhan di atas 20 persen, seperti PPh Badan (tumbuh 23,28 persen), PPh Orang Pribadi (tumbuh 20,52 persen), PPh Pasal 22

Impor dan PPN Impor yang masing-masing tumbuh 28,32 persen dan 27,46 persen.

Pertumbuhan PPh Pasal 21 pada periode Januari - Juli 2018 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, dari sebesar 0,57 persen naik menjadi 16,13 persen. Faktor utama peningkatan ini adalah pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi PNS, TNI-POLRI, dan -untuk pertama kalinya- para pensiunan, sehubungan dengan bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, serta pencairan THR bagi pegawai/ buruh/karyawan swasta.

Pembayaran THR, Gaji ke-13 dan adanya gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, juga mendorong peningkatan penerimaan PPN Dalam Negeri di sektor Perdagangan, yang sepanjang periode Januari s.d. Juli 2018 mampu tumbuh 19,43 persen, lebih besar dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 13,54 persen. Meskipun penerimaan PPN sektor Perdagangan mampu tumbuh mencapai 19,43 persen, namun perlambatan pertumbuhan

Jenis Pajak	growth	
	Januari - Juli 2017	Januari - Juli 2018
PPh Pasal 21	0,57%	16,13%
PPh Badan	14,76%	23,28%
PPh OP	54,78%	20,52%
PPN Dalam Negeri	11,94%	8,10%
Pajak atas Impor	17,50%	27,06%
- PPh 22 Impor	15,86%	28,32%
- PPN Impor	18,80%	27,46%
- PPnBM Impor	-3,23%	1,45%



Halaman ini sengaja dikosongkan

PPN di sektor Industri Pengolahan mengakibatkan secara keseluruhan PPN-DN hanya tumbuh 8,10 persen sepanjang periode Januari s.d. Juli 2018, lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang tumbuh sebesar 11,94 persen.

Penerimaan PPN-DN di beberapa subsektor Industri Pengolahan, terutama yang menghasilkan barang konsumsi rumah tangga, sebenarnya mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, seperti Industri Minuman (tumbuh 25,81 persen), Industri Tekstil (tumbuh 223,46 persen), dan Industri Pakaian Jadi (tumbuh 80,41 persen). Namun demikian, adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) beberapa Wajib Pajak besar penentu penerimaan di subsektor Industri Pengilangan mendilusi pertumbuhan PPN -DN tersebut.

Terjanganya kinerja positif penerimaan pajak juga tercermin dari penerimaan sektor usaha utama yang tumbuh cukup bagus, seperti Industri Pengolahan (12,48 persen), Perdagangan (30,36 persen) dan Pertanian (35,75 persen). Khusus untuk sektor Pertambangan, pertumbuhannya bahkan mencapai 78,08 persen seiring dengan trend kenaikan harga komoditas. Harga Batubara Acuan sebagai contoh, dalam dua tahun terakhir naik dari USD 53,2 per ton pada bulan Januari 2016 menjadi USD 104,65 per ton pada bulan Juli 2018.

## KEPABEANAN DAN CUKAI

Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai 16,39 persen tertinggi dalam 3 tahun terakhir, terjadi pada semua komponen penerimaan.

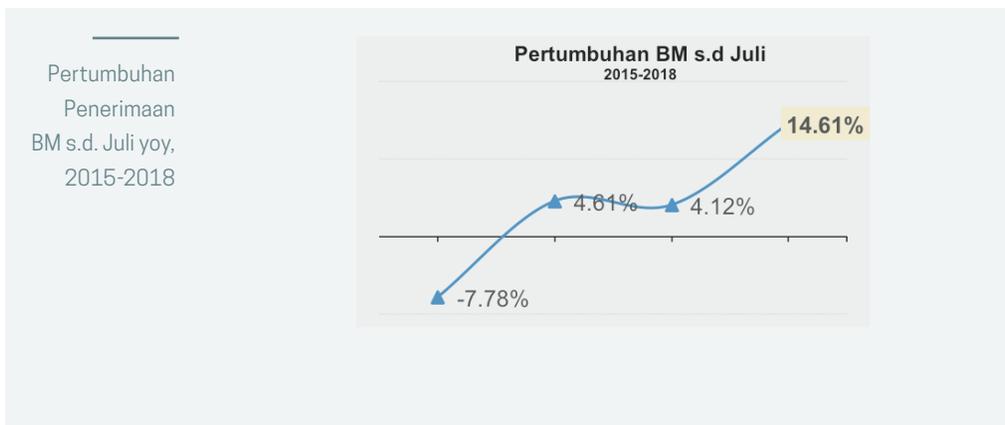
No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi 2018	% Capaian	Realisasi 2017	Pertumbuhan (y-o-y)		
						Nominal	% 2018	% 2017
1	BEA MASUK	35.70	21.42	59.99%	18.69	2.73	14.61%	4.12%
2	CUKAI	155.40	67.55	43.47%	59.14	8.41	14.21%	9.52%
3	BEA KELUAR	3.00	3.91	130.41%	1.97	1.95	98.95%	34.74%
	TOTAL	194.10	92.88	47.85%	79.80	13.08	16.39%	8.70%
	PPN Impor		101.89		79.94	21.95	27.46%	18.80%
	PPn BM Impor		2.50		2.46	0.04	1.45%	-3.23%
	PPh Pasal 22 Impor		32.01		24.95	7.06	28.32%	15.86%
	Total PDRI lainnya		136.39		107.35	29.05	27.06%	17.50%
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		229.28		187.15	42.13	22.51%	13.58%

Pertumbuhan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, S.D 2015-2018



Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai hingga bulan Juli 2018 mengalami pertumbuhan positif, bahkan pertumbuhan penerimaan tersebut masih yang tertinggi sejak tahun 2015. Kinerja pertumbuhan tersebut terjadi pada semua komponen penerimaan seperti bea masuk (BM), bea keluar (BK) dan cukai. Penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI) juga tumbuh lebih baik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian penerimaan tersebut dipengaruhi oleh membaiknya perdagangan internasional yang ditandai meningkatnya nilai impor dan ekspor. Penguatan program reformasi kepabeanan dan cukai (PIBT, PCBT dan PEBT) juga memberi pengaruh positif ditambah membaiknya harga komoditas dan permintaan dari negara mitra dagang.



Penerimaan BM tumbuh positif dan masih yang tertinggi di 3 tahun terakhir. Capaian ini terdiri dari penerimaan rutin dan *extra effort*, yang masing-masing mengalami pertumbuhan 12,96 persen dan 43,14 persen. Aktivitas impor yang meningkat sebesar 8,58 persen ditambah dampak positif program PIBT menjadi faktor pendorong tumbuhnya penerimaan BM meskipun masih dibayangi utilisasi FTA (*Free Trade Agreement*) yang terus tumbuh

hingga 2,6 persen.

Pertumbuhan impor yang menjadi pendorong penerimaan BM, masih didominasi oleh importasi produktif berupa bahan baku/penolong serta barang modal masing-masing sebesar USD 72,96 miliar dan USD 18,22 miliar. Hal itu memberikan sinyal bahwa aktifitas sektor industri masih berkembang dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.



Kinerja BK yang hingga bulan Juli tumbuh 98,95 persen, berdampak positif penerimaan BK yang capaiannya sudah **130,41 persen dari target APBN 2018**. Ekspor komoditas minerba yang tumbuh 172,00 persen menjadi faktor utama pendorong kinerja BK. Harga komoditas mineral dan permintaan mitra dagang utama, menjadi faktor pendorong pertumbuhan minerba.



Capaian cukai masih yang tertinggi dibanding komponen penerimaan lain, dengan kontributor tertinggi cukai hasil tembakau (CHT) disusul oleh minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol (EA). Penerimaan CHT didorong oleh pertumbuhan positif 1,76 persen pada produk hasil tembakau, yang selama 3 tahun terakhir selalu tumbuh negatif. Selain itu, kenaikan tarif efektif

sebesar 10,71 persen yang lebih tinggi dibanding kenaikan rata-rata tarif yang 10,04 persen turut mendorong capaian penerimaan CHT. Sedangkan produksi MMEA yang mengalami kenaikan, terutama MMEA produksi dalam negeri, menjadi pendorong utama capaian penerimaan cukai MMEA.

## DJBC Mendorong Kinerja Ekspor

Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah dua negara yang berkontribusi besar dalam perekonomian dunia. Akibatnya, sedikit saja terjadi ketegangan diantara keduanya maka dipastikan berdampak pada perekonomian dan perdagangan dunia, termasuk juga kinerja perekonomian dan perdagangan Indonesia.

Indonesia terkena dampak perang dagang AS – RRT melalui keterlibatannya dalam supply chain produksi, dengan komoditas ekspor yang mungkin terdampak seperti bahan bakar mineral (HS27), bijih logam (HS26) dan besi/baja (HS72). BKF memperkirakan bahwa ekspor Indonesia pada 2018 yang bisa mencapai USD 185,2 miliar berisiko turun USD 1,0 miliar, sedang pertumbuhan ekonomi diperkirakan turun sekitar 0,1 persen.

Menghadapi ancaman pelemahan ekspor tersebut, DJBC telah melakukan usaha antisipasi dengan mempersiapkan strategi sebagai upaya serius meningkatkan ekspor nasional. Strategi pertamanya adalah dengan melakukan penyederhanaan prosedur ekspor, seperti:

1. Percepatan perizinan investasi tujuan ekspor secara online (OSS);
2. Otomasi pelayanan & relaksasi prosedur ekspor (termasuk hand carry); dan
3. Pemeriksaan barang ekspor selektif berbasis manajemen risiko.

Strategi berikutnya dengan memberikan insentif fiskal bagi industri yang berorientasi ekspor, seperti:

1. Kemudahan persyaratan mendapatkan insentif fiskal;
2. Pemanfaatan Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk ekspor;
3. Pembentukan klinik pelayanan ekspor; dan

4. Percepatan restitusi.

Tidak berhenti sampai di situ, DJBC bersama DJP juga telah menyediakan berbagai fasilitasi demi menarik investasi dan mendorong ekspor, fasilitasi tersebut berupa:

1. Insentif Perpajakan Sektoral, seperti:
  - a. Pembebasan bea masuk (BM) untuk Mesin & Barang Modal (master list);
  - b. Insentif pembebasan/ pengembalian (421 perusahaan termasuk fasilitas KITE-IKM)
  - c. Insentif BMDTP untuk industri tertentu (pagu: Rp553,7 miliar)
  - d. Insentif Tax Allowance/Holiday (Rp1,49 triliun)
  - e. Pengurangan/penurunan PPh (Rp9,77 triliun)
  - f. Percepatan restitusi (Rp55 triliun)
2. Insentif Perpajakan Spasial (Kawasan)
  - a. Kawasan Ekonomi Khusus (12 KEK)
  - b. Kawasan Industri/Kawasan Berikat (1.396 KB)
  - c. Pusat Logistik Berikat (60 PLB di 81 lokasi)
  - d. Free Trade Zone (4 KPBPB)

# PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Realisasi PNBP s/d 31 Juli 2018 (dalam miliar Rupiah)

	2018	Realisasi		
	APBN	s.d 31 Juli 2018	% thd APBN	Growth
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak	275.427,92	211.035,21	76,62	22,53
A. Penerimaan SDA	103.674,80	92.339,69	89,07	44,79
1 Migas	80.349,00	72.665,72	90,43	50,02
a Minyak Bumi	59.582,70	72.665,72	121,94	50,02
b Gas Alam	20.766,30	-	0,00	0,00
2 Non Migas	23.325,80	19.683,97	84,39	28,28
a Pertambangan Minerba	17.858,52	16.443,61	92,08	28,35
b Kehutanan	4.166,71	2.297,58	55,14	12,28
c Perikanan	600,00	281,35	46,89	22,83
d Pend. Per. Panas Bumi	700,59	661,43	94,41	156,56
B Pendapatan dari KND	44.695,40	38.079,32	85,20	7,41
C. PNBP Lainnya	83.753,12	54.945,30	65,60	8,30
D. Pendapatan BLU	43.304,60	25.670,90	59,28	15,25

Sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, realisasi PNBP mencapai 211,04 triliun atau 76,62 persen dari APBN tahun 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 22,53 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2017. Kenaikan ini antara lain disebabkan meningkatnya harga komoditas, khususnya harga

minyak bumi dan batu bara pada tahun 2018.

Realisasi penerimaan SDA Migas mencapai Rp72,66 triliun atau 90,43 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 50,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Kenaikan

penerimaan SDA Migas tersebut antara lain disebabkan karena lebih tingginya realisasi ICP periode bulan Desember 2017 s.d. Juli 2018, yaitu sebesar USD 66,37 per barel atau periode bulan Januari s.d. Juli 2018 sebesar USD 67,14 per barel, dibandingkan realisasi ICP bulan Desember 2016 s.d. Juli 2017, yaitu sebesar USD 48,75 per barel atau periode bulan Januari s.d. Juli 2017 sebesar USD 48,41 per barel.

Realisasi penerimaan SDA Non Migas mencapai Rp19,68 triliun atau 84,39 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi 28,28 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp15,34 triliun. Peningkatan ini diantaranya disebabkan oleh kenaikan rata-rata harga batubara acuan (HBA) pada periode Januari s.d. Juli 2018 yang mencapai USD 97,66 per ton, lebih tinggi dibandingkan HBA periode Januari s.d. Juli 2017 sebesar USD 81,74 per ton.

Realisasi pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan mencapai Rp38,08 triliun atau 85,20 persen dari

target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi 7,41 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp35,45 triliun. Peningkatan ini diantaranya disebabkan perbaikan kinerja BUMN.

Realisasi penerimaan PNBP Lainnya mencapai Rp54,94 triliun atau 65,60 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut meningkat sebesar 8,30 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp50,73 triliun. Peningkatan realisasi penerimaan PNBP Lainnya ini antara lain disebabkan kenaikan realisasi Penjualan Hasil Tambang yang mencapai Rp12,88 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp9,17 triliun, sejalan dengan peningkatan HBA.

Untuk pendapatan BLU, hingga 31 Juli 2018 terealisasi sebesar Rp25,67 triliun, atau mencapai 59,28 persen dari target APBN tahun 2018, meningkat 15,25 persen dari realisasi periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp22,27 triliun.

# BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) s.d 31 Juli 2018 dipengaruhi antara lain oleh Belanja Pegawai dan Belanja Barang.

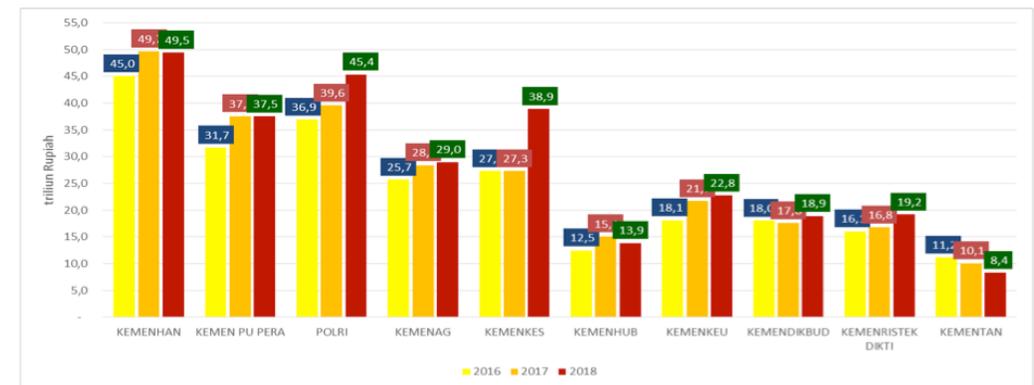
(dalam triliun Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat (triliun Rupiah)	2018			
	APBN	Realisasi s.d. Juli 2018	% thd APBNP	% Growth
<b>Belanja K/L</b>	<b>847,44</b>	<b>375,93</b>	<b>44,36</b>	<b>14,29</b>
Belanja Pegawai	227,46	132,68	58,33	9,71
Belanja Barang	338,83	132,88	39,22	13,04
Belanja Modal	203,88	54,13	26,55	(7,37)
Bantuan Sosial	77,26	56,24	72,79	75,82
<b>Belanja Non K/L</b>	<b>607,06</b>	<b>321,09</b>	<b>52,89</b>	<b>16,41</b>
Pembayaran Bunga Utang	238,61	146,45	61,38	11,88
Subsidi	156,23	91,26	58,41	34,52
<b>Jumlah</b>	<b>1.454,49</b>	<b>697,02</b>	<b>47,92</b>	<b>15,26</b>

**R**ealisasi BPP s.d 31 Juli 2018 mencapai Rp697,02 triliun atau 47,92 persen dari pagu alokasi APBN 2018. Sedangkan realisasi BPP selama bulan Juli 2018 mencapai Rp138,59 triliun atau sekitar 9,53 persen dari pagu alokasi APBN 2018. Komposisi BPP tersebut terdiri atas 1) belanja K/L sebesar Rp375,93 triliun atau 44,36 persen; dan 2) Belanja NonK/L sebesar Rp321,09 triliun atau 52,92 persen dari pagu alokasi APBN 2018.

Peningkatan realisasi BPP tersebut tidak terlepas dari upaya peningkatan

kualitas penganggaran dan pelaksanaan belanja yang secara kontinyu, dan dilakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, antara lain 1) kebijakan penyusunan rencana umum pengadaan (RUP) sebelum tahun anggaran dimulai; 2) percepatan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan lelang dini, dan persiapan dokumen yang lebih baik; 3) pemanfaatan *e-procurement*; 4) pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi; serta 5) kebijakan efisiensi belanja barang.



## Realisasi Belanja K/L Tahun 2018

Realisasi belanja K/L s.d 31 Juli 2018 mencapai Rp375,93 triliun atau 44,36 persen dari pagu alokasi APBN 2018 (tumbuh 9,71 persen dari tahun 2017). Realisasi belanja K/L tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja K/L pada periode yang sama tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L tersebut antara lain : 1) kelanjutan kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan melalui lelang dini, percepatan penyaluran bantuan

sosial seperti PBI, PKH dan bidik misi, pembayaran THR bagi PNS; dan 2) pelaksanaan beberapa agenda strategis seperti Pilkada serentak dan persiapan Asian Games 2018. Realisasi belanja pegawai pada s.d 31 Juli 2018 sudah mencapai Rp132,68 triliun atau 58,33 persen dari alokasi pagu APBN tahun 2018. Realisasi belanja pegawai tersebut lebih tinggi dari pada periode yang sama tahun 2017. Peningkatan realisasi belanja pegawai tersebut disebabkan antara lain 1) pembayaran tunjangan profesi guru (TPG), dan tunjangan khusus guru

Realisasi Belanja K/L 2016 - 2018

Realisasi 15 K/L dengan pagu terbesar s.d. 31 Juli 2018

nonPNS; dan 2) pembayaran THR bagi pensiunan.

Realisasi belanja barang s.d 31 Juli 2018 mencapai Rp132,88 triliun atau 39,22 persen dari pagu alokasi APBN 2018 (tumbuh 13,03 persen dari tahun 2017). Pada periode ini, Pemerintah telah melakukan kebijakan *capping* pada belanja barang yang ditujukan dalam rangka menjaga efisiensi. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas belanja agar lebih efektif, efisien

dan fokus pada pencapaian output. Meskipun terdapat kebijakan efisiensi pada belanja barang, Pemerintah tetap berupaya menjaga capaian *output* dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah mengedepankan konsep *value for money* (VFM) sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam membelanjakan anggarannya. Setiap anggaran yang dikeluarkan, Pemerintah akan menghasilkan *output* yang lebih berkualitas sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dengan kebijakan

efisiensi barang tersebut, diharapkan APBN sebagai instrumen fiskal dapat secara lebih optimal menstimulasi perekonomian. Kebijakan efisiensi tersebut dilakukan pada belanja perjalanan dinas dan paket *meeting*, belanja honorarium, serta belanja barang nonoperasional lainnya. Dengan kebijakan efisiensi tersebut, diharapkan tidak mengganggu aktivitas/kegiatan dari K/L dalam pencapaian *output*nya maupun pemberian layanan kepada masyarakat.

K/L tersebut lebih baik dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2017. Berdasarkan tabel di atas terdapat delapan K/L yang mempunyai kinerja penyerapan anggaran lebih tinggi antara lain: 1) Kementerian Pertahanan, 2) Kepolisian RI, 3) Kementerian Kesehatan, 4) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 5) Kementerian Agama, 6) Kementerian Sosial, 7) Kementerian Keuangan, dan 8) Kementerian Ristek Dikti.

Realisasi kegiatan dari 10 K/L yang sudah dikontraskan realisasi s.d 31 Juli 2018

Realisasi 15 K/L dengan pagu terbesar s.d 31 Juli 2018 mencapai Rp705,12 triliun atau 46,07 persen dari alokasi pagu APBN 2018. Realisasi belanja

Selain itu, realisasi kegiatan dari 10 K/L yang sudah dikontraskan realisasi s.d 31 Juli 2018 telah mencapai Rp194,7 triliun atau 95,51 persen dari pagu alokasi Belanja Modal tahun 2018

No.	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2017			2018		
		APBNP	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd APBN
1	KEMENHAN	114,82	49,68	43,27	107,68	49,46	45,93
2	KEMEN PU PERA	104,24	37,56	36,03	107,39	37,54	34,96
3	POLRI	98,22	39,57	40,29	95,03	45,37	47,74
4	KEMENAG	63,49	28,41	44,75	62,15	28,98	46,63
5	KEMENKES	55,86	27,29	48,86	59,10	38,93	65,88
6	KEMENHUB	44,64	15,12	33,88	48,20	13,89	28,81
7	KEMENKEU	40,54	21,74	53,63	45,68	22,75	49,81
8	KEMENDIKBUD	37,97	11,55	66,69	40,09	23,97	58,05
9	KEMENRISTEK DIKTI	39,49	16,81	42,57	41,28	19,17	46,44
10	KEMENTAN	24,15	17,58	46,32	23,82	18,93	47,21
11	KEMENSOS	17,32	10,11	41,89	41,30	8,35	35,07
12	KEMENKUMHAM	11,21	4,61	41,09	10,59	6,32	59,65
13	KKP	9,14	4,61	56,29	7,29	4,97	60,10
14	MA	8,18	1,83	20,00	8,26	2,75	37,67
15	KEMENLU	7,17	3,21	44,82	7,25	3,45	47,56
15 K/L dengan Pagu Terbesar		676,43	289,70	42,83	705,12	324,83	46,07
K/L Lainnya		122,16	38,82	31,78	142,31	51,10	35,91
<b>JUMLAH</b>		<b>798,59</b>	<b>328,52</b>	<b>41,14</b>	<b>847,44</b>	<b>375,93</b>	<b>44,39</b>

No	Kementerian/Lembaga	APBN 2018	Belanja Modal	Pagu yang sudah dikontraskan	% thd Belanja Modal
1	KEMEN PU PERA	107,40	75,83	75,31	99,33
2	KEMENHUB	48,20	27,46	28,78	104,77
3	POLRI	95,25	28,91	29,33	101,45
4	KEMENKES	59,10	3,13	6,49	207,40
5	KEMENKEU	45,68	2,20	2,55	115,95
6	KEMENRISTEK & PT	41,32	3,71	5,26	141,57
7	KEMENLU	7,25	1,10	0,62	56,48
8	KEMEN KP	7,29	1,01	1,59	156,96
9	KEMENHAN	107,72	30,06	5,45	18,13
10	KEMENAG	62,15	4,25	2,57	60,60
<b>Total 10 K/L</b>		<b>581,36</b>	<b>177,66</b>	<b>157,94</b>	<b>88,90</b>
<b>Total K/L Lainnya</b>		<b>266,07</b>	<b>26,22</b>	<b>36,78</b>	<b>140,25</b>
<b>Total</b>		<b>847,44</b>	<b>203,88</b>	<b>194,72</b>	<b>95,51</b>

sebesar Rp203,9 triliun.

Sejalan dengan tema pembangunan kebijakan fiskal, yaitu Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, maka alokasi belanja K/L diarahkan kepada hal-hal yang lebih produktif terutama belanja prioritas bidang antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pangan, dengan tetap menjaga efektivitas dan efisiensi dalam penganggaran maupun pelaksanaan anggaran. Sampai dengan 31 Juli 2018, realisasi anggaran K/L bidang infrastruktur mencapai Rp53,41 triliun atau 32,95 persen dari pagu alokasi APBN 2018. Realisasi belanja K/L bidang infrastruktur lebih rendah (1,98 persen) dari periode yang sama tahun sebelum. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan

peraturan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang diberlakukan semenjak akhir Juni 2018.

## Realisasi Belanja Non K/L Tahun 2018

Realisasi belanja nonK/L s.d 31 Juli 2018 mencapai sebesar Rp239,16 triliun atau 39,40 persen dari pagu alokasi APBN tahun 2018. Realisasi belanja nonK/L tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja K/L pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi belanja nonK/L dipengaruhi oleh faktor-faktor, antara lain: 1) realisasi belanja pegawai lebih tinggi terutama pembayaran THR bagi pensiunan; 2) outstanding utang, kenaikan tingkat bunga obligasi negara, dan melemahnya nilai tukar rupiah; dan

Realisasi belanja K/L bidang prioritas

No.	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2017			2018			Δ	
		APBNP	Realisasi 31 Juli	% thd APBNP	APBN	Realisasi 31 Juli	% thd APBN	Nominal	%Δ
<b>Bidang Infrastruktur</b>									
1	KEMEN PU PERA	104,24	37,56	36,03	107,39	37,54	34,96	(0,02)	(0,05)
2	KEMENHUB	44,64	15,12	33,88	48,20	13,89	28,81	(1,24)	(8,17)
3	KEMEN ESDM	6,57	1,80	27,43	6,50	1,98	30,44	0,18	9,78
<b>JUMLAH</b>		<b>155,45</b>	<b>54,49</b>	<b>35,05</b>	<b>162,09</b>	<b>53,41</b>	<b>32,95</b>	<b>(1,08)</b>	<b>(1,98)</b>
<b>Bidang Pendidikan</b>									
1	KEMENAG	63,49	28,41	44,75	62,15	28,98	46,63	0,57	2,01
2	KEMENDIKBUD	37,97	17,58	46,32	40,09	18,93	47,21	1,34	7,65
3	KEMENRISTEK DIKTI	39,49	16,81	42,57	41,28	19,17	46,44	2,36	14,05
<b>JUMLAH</b>		<b>140,94</b>	<b>62,81</b>	<b>44,56</b>	<b>143,53</b>	<b>67,08</b>	<b>46,74</b>	<b>4,28</b>	<b>6,81</b>
<b>Bidang Kesehatan</b>									
1	KEMENKES	55,86	27,29	48,86	59,10	38,93	65,88	11,64	42,64
2	BKKBN	2,73	0,95	34,73	5,54	1,86	33,52	0,91	96,12
3	BADAN POM	1,67	0,56	33,76	2,17	0,60	27,75	0,04	6,98
<b>JUMLAH</b>		<b>60,26</b>	<b>28,81</b>	<b>47,80</b>	<b>66,82</b>	<b>41,40</b>	<b>61,95</b>	<b>12,59</b>	<b>43,70</b>
<b>Bidang Pangan</b>									
1	KEMENTAN	24,15	10,11	41,89	23,82	8,35	35,07	(1,76)	(17,41)
2	KKP	9,14	1,83	20,00	7,29	2,75	37,67	0,92	50,23
3	KEMENDAG	3,27	0,69	21,03	3,53	0,75	21,11	0,06	8,37
<b>JUMLAH</b>		<b>36,56</b>	<b>12,63</b>	<b>34,55</b>	<b>34,64</b>	<b>11,84</b>	<b>34,19</b>	<b>(0,79)</b>	<b>(6,22)</b>

Progres Kegiatan Prioritas/Utama Tahun 2018	3) realisasi pembayaran subsidi merupakan dampak dari menguatnya harga minyak dunia, melemahnya nilai tukar rupiah, serta pemenuhan kewajiban Pemerintah atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya sesuai hasil audit.	sampaikan realisasi capaian output kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta capaian output K/L secara nasional s.d 31 Juli 2018 agar dapat diketahui bahwa pelaksanaan anggaran telah membuahkan hasil berupa output infrastruktur yang dapat mendorong jalannya perekonomian.
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (S.d Juli 2018)	Sebagai informasi berikut ini kami	

No.	UNIT ORGANISASI / KEGIATAN PRIORITAS	TARGET TAHUN 2018	ALOKASI ANGGARAN (Ribuan Rupiah)	PROGRES KEUANGAN	PROGRES FISIK
<b>A DITJEN SUMBER DAYA AIR</b>					
1	Bendungan	48 Bendungan	7.525,74	40,80	41,65
	a. Bendungan Baru	14 Bendungan	113,91	1,22	1,21
	b. Bendungan On Going	34 Bendungan	7.411,83	40,35	42,24
2	Embung	43 Buah	636,91	35,40	41,50
3	Air Baku	5,92m3/dt	3.569,45	44,80	51,30
4	Jaringan Irigasi	145.533 Ha	4.629,68	34,65	38,42
5	Sapras Pengendali Daya Rusak Air	221 Km	3.332,20	46,17	50,24
6	Pengendali Sedimen dan Lahar	31 Buah	233,86	57,24	58,43
<b>B DITJEN BINA MARGA</b>					
1	Pembangunan Jalan	811,49 km	6.542,76	24,10	24,12
2	Pembangunan Jembatan	9,708,91 km	3.626,59	19,94	27,55
3	Pembangunan Jalan Tol	33,05 km	1.946,06	50,12	50,78
4	Pembangunan Fly Over / Underpass	2,420,40 km	658,37	33,15	33,54
<b>C DITJEN CIPTA KARYA</b>					
1	Pembangunan SPAM	3.437 ltr/dt	3.252,00	43,90	35,90
2	Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh	1.991 Ha	1.637,75	33,85	34,60
3	Sanitasi dan Persampahan	2.095.063 KK	2.807,02	32,55	30,99
4	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	401.622 m2	3.217,29	56,06	57,82
<b>D DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN</b>					
1	Pembangunan Rumah Susun	13.500 Unit	4.955,02	20,05	19,35
2	Pembangunan Rumah Khusus	5.000 Unit	730,03	22,14	23,46
3	Pembangunan Rumah Swadaya	250.000 Unit	3.259,16	61,87	58,29
<b>JUMLAH</b>			<b>60.085,64</b>		

# TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

**D**alam rangka mendorong pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, memperbaiki kualitas pelayanan dasar publik, dan sekaligus mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat antardaerah, alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ditetapkan sebesar Rp766,16 triliun pada APBN Tahun Anggaran 2018. Dari jumlah pagu tersebut, realisasi penyaluran TKDD per 31 Juli 2018 mencapai Rp448,64 triliun (58,56 persen dari pagu alokasi TKDD), atau lebih rendah Rp10,46 triliun jika dibandingkan dengan penyaluran anggaran TKDD pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp459,10 triliun (59,91 persen dari pagu alokasi). Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan realisasi Dana Perimbangan, terutama dikarenakan lebih rendahnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), serta realisasi Dana Insentif Daerah (DID).

## A. DANA PERIMBANGAN

Dalam APBN Tahun Anggaran (TA) 2018, Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp676,60 triliun, terdiri atas Dana Transfer Umum (DTU) sebesar

Rp490,71 triliun, dan Dana Transfer Khusus (DTK) sebesar Rp185,89 triliun. Sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, realisasi Dana Perimbangan mencapai Rp401,52 triliun atau 59,34 persen dari pagu dalam APBN TA 2018, lebih rendah sebesar Rp7,73 triliun dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp409,25 triliun, atau 60,31 persen dari pagu alokasi APBN TA 2017.

### 1. DANA TRANSFER UMUM (DTU)

Sampai dengan 31 Juli 2018, realisasi Dana Transfer Umum (DTU) mencapai Rp310,58 triliun, atau 63,29 persen dari pagu anggaran DTU yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar Rp490,71 triliun. Secara nominal, capaian ini lebih rendah Rp5,83 triliun jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp316,41 triliun atau 64,06 persen dari pagu anggaran. Hal ini terutama dipengaruhi oleh realisasi penyaluran DBH yang lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya.

#### a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Sampai dengan 31 Juli 2018, realisasi penyaluran DAU telah mencapai Rp267,33 triliun, lebih tinggi sebesar

Rp0,57 triliun bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp266,76 triliun. Realisasi penyaluran DAU hingga 31 Juli 2018 dipengaruhi oleh adanya penundaan penyaluran DAU terhadap 67 pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan IKD sebesar Rp290,89 miliar, serta penundaan penyaluran DAU terhadap 8 pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan belanja infrastruktur sebesar Rp33,58 miliar.

Di sisi lain, Penyaluran DAU periode ini telah memperhitungkan penyelesaian kewajiban tunggakan iuran jaminan kesehatan kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) terhadap 37 pemerintah daerah sebesar Rp28,46 miliar serta penyaluran kembali DAU terhadap daerah yang telah menyampaikan laporan IKD sebanyak 6 pemerintah daerah sebesar Rp47,94 miliar. Secara umum DAU yang telah ditransfer mampu menjaga keseimbangan pelayanan publik dasar antardaerah.

#### b. Dana Bagi Hasil (DBH)

Pada APBN tahun 2018, pagu anggaran DBH ditetapkan sebesar Rp89,22 triliun, atau Rp6,16 triliun lebih rendah bila dibandingkan pagu

alokasinya pada tahun sebelumnya sebesar Rp95,38 triliun. Hingga 31 Juli 2018, realisasi penyaluran DBH mencapai sebesar Rp43,24 triliun, atau 48,46 persen dari pagu alokasi yang ditetapkan dalam APBN 2018. Jumlah ini, berarti lebih rendah Rp6,41 triliun jika dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp49,65 triliun. Penurunan penyaluran DBH di awal triwulan III tahun 2018, dipengaruhi oleh:

- Adanya penyaluran Kurang Bayar DBH TA 2015 sebesar Rp10,90 triliun yang disalurkan pada bulan Februari tahun 2017, sehingga realisasi penyaluran DBH pada awal tahun 2017 relatif besar; dan
- Perubahan pola Penyaluran DBH di Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2018, yang semula sebesar 25 persen dari pagu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 50/PMK.07/2017, diubah menjadi sebesar 20 persen dari pagu, sebagaimana diatur dalam PMK 112/PMK.07/2017.

Tujuan dari penurunan besaran penyaluran pada Triwulan I dan Triwulan II tersebut dimaksudkan untuk mengurangi potensi terjadinya

Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar DBH yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

## 2. DANA TRANSFER KHUSUS

Dalam APBN TA 2018, Dana Transfer Khusus (DTK) dianggarkan sebesar Rp185,89 triliun, terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp62,44 triliun, dan DAK Nonfisik sebesar Rp123,45 triliun. Sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, realisasi penyaluran DTK mencapai Rp90,95 triliun, atau 48,93 persen dari pagunya dalam APBN TA 2018, yang berarti Rp1,90 triliun lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasinya periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp92,84 triliun, atau 50,28 persen dari pagu APBN TA 2017. Realisasi penyaluran DTK tersebut terutama dipengaruhi oleh rendahnya realisasi DAK Fisik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

### a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dalam APBN tahun 2018, pagu anggaran DAK Fisik ditetapkan sebesar Rp62,44 triliun. Sampai dengan 31 Juli 2018, realisasi penyaluran DAK Fisik mencapai Rp19,28 triliun, atau 30,88 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut terdiri dari DAK Reguler sebesar Rp9,69 triliun, DAK Penugasan Rp7,74 triliun, dan DAK Afirmasi sebesar Rp1,85 miliar. Realisasi DAK Fisik per 31 Juli 2018 tersebut lebih rendah Rp7,42 triliun

apabila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp26,70 triliun, atau 38,40 persen dari pagu. Realisasi penyaluran DAK Fisik tahun 2018 yang lebih rendah dari tahun 2017 tersebut, karena adanya penyempurnaan ketentuan penyaluran yang diarahkan agar hasil-hasil dari pelaksanaan DAK Fisik bisa lebih sesuai dengan target/sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal, dengan penambahan persyaratan berupa penyampaian syarat daftar Rencana Kegiatan dan daftar Kontrak DAK Fisik, selain syarat Perda APBD dan Laporan Pelaksanaan Tahun sebelumnya.

Hingga 23 Juli 2018, data besaran daftar kontrak yang disampaikan pemerintah daerah telah mencapai 93,52 persen dari pagu total sebesar Rp62,44 triliun, dimana besaran daftar kontrak tersebut menggambarkan *outlook* penyaluran DAK Fisik tahun 2018. Persentase *outlook* penyaluran DAK Fisik 2018 lebih besar dibanding dengan realisasi penyaluran DAK tahun 2017 yang sebesar 87,6 persen (tidak termasuk DAK *carry over*). Angka *outlook* penyaluran DAK Fisik yang lebih besar menunjukkan adanya *pebaikan* perencanaan DAK Fisik di tahun 2018 di daerah. Selain itu, daftar kontrak yang disampaikan Pemerintah Daerah dapat dipastikan telah sesuai dengan daftar rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Teknis, sehingga pelaksanaan DAK

Fisik di daerah dapat dikatakan lebih termonitor dalam rangka pemenuhan capaian target nasional.

### b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Dalam rangka meringankan beban masyarakat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, telah ditetapkan dalam APBN tahun 2018 alokasi anggaran DAK Nonfisik sebesar Rp123,45 triliun. Hingga tanggal 31 Juli 2018, realisasi penyaluran DAK Nonfisik mencapai Rp71,67 triliun, atau 58,05 persen dari pagu alokasi yang ditetapkan pada APBN 2018. Jumlah ini, berarti Rp5,52 triliun lebih tinggi bila dibandingkan dengan kinerja realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp66,14 triliun, atau 57,46 persen dari pagu.

Pada tahun 2018 juga telah dilakukan perbaikan penyaluran DAK Nonfisik. Apabila tahun 2017 penyaluran DAK Nonfisik berupa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), dan Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) disalurkan secara sekaligus, atau sesuai besaran persentase tertentu yang ditetapkan per triwulan, maka pada tahun 2018 penyaluran kedua jenis dana tersebut dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan, sehingga penyaluran hanya dilaksanakan bagi daerah yang telah memenuhi kinerja penyerapan dan persyaratan pelaporan. Seiring

dengan membaiknya pemahaman dan kedisiplinan pelaporan daerah, realisasi Dana BOS, BOK, dan BOKB relatif lebih baik.

Untuk meningkatkan realisasi penyaluran DAK Nonfisik, Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya, antara lain berkoordinasi dengan K/L pengampu untuk mendorong daerah segera menyampaikan laporan DAK Nonfisik, yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, rekonsiliasi data, pemberitahuan melalui surat kepada daerah, dan kegiatan lainnya.

### B. DANA INSENTIF DAERAH

Pada APBN 2018, anggaran pagu DID ditetapkan sebesar Rp8,50 triliun. Hingga 31 Juli 2018, realisasi penyaluran DID mencapai Rp4,43 triliun atau 52,17 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp7,50 triliun, atau 100 persen. Lebih rendahnya realisasi penyaluran DID tersebut terutama disebabkan karena adanya perubahan pola penyaluran DID yang mensyaratkan adanya kinerja penyerapan dalam penyaluran tahap II, yang pada tahun sebelumnya tidak dipersyaratkan. Sebagaimana diketahui bahwa penyaluran DID tahun 2018, dilakukan dalam 2 tahap, dimana untuk Tahap I dapat disalurkan paling cepat pada bulan Februari

sebesar 50 persen, sedangkan Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50 persen setelah pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan Tahap I paling sedikit 70 persen, yang disampaikan paling lambat bulan Agustus.

#### C. DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN DI YOGYAKARTA

Dalam APBN 2018, pagu anggaran Dana Otsus pada Provinsi Aceh, serta Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur pada Provinsi Papua dan Papua Barat ditetapkan sebesar Rp20,06 triliun. Sampai dengan 31 Juli 2018, realisasi penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur mencapai Rp6,02 triliun, atau 30 persen dari pagu, yang berarti Rp0,15 triliun lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp5,86 triliun.

Sementara itu, Dana Keistimewaan pada Provinsi DI Yogyakarta (DIY) ditetapkan sebesar Rp1,00 triliun, dan realisasinya sampai dengan 31 Juli 2018 telah mencapai Rp0,80 triliun, atau 80 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp0,16 triliun dibandingkan dengan realisasi

pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp0,64 triliun, atau 80,0 persen dari pagu alokasi Rp0,80 triliun.

#### D. DANA DESA

Dalam APBN 2018, pagu Dana Desa ditetapkan sebesar Rp60,00 triliun. Sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, realisasi penyaluran Dana Desa Tahap I dan II dari RKUN ke RKUD telah mencapai Rp35,86 triliun, atau 59,77 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp0,02 triliun apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp35,84 triliun, atau 59,73 persen dari pagu alokasi.

Selanjutnya dalam rangka mempercepat penyaluran Dana Desa Tahap III, Kementerian Keuangan akan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain guna mendorong daerah untuk segera menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa dan laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun s.d. Tahap II sebagai syarat penyaluran Tahap III. Disamping itu, KPPN juga diminta untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan penyaluran Dana Desa Tahap III.

Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (YoY)  
Tanggal: 1 Januari s.d. 31 Juli 2018

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2017			2018		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
<b>Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>766.339,33</b>	<b>459.096,03</b>	<b>59,91</b>	<b>766.162,58</b>	<b>448.635,61</b>	<b>58,56</b>
<b>Transfer ke Daerah</b>	<b>706.339,33</b>	<b>423.256,91</b>	<b>59,92</b>	<b>706.162,58</b>	<b>412.774,94</b>	<b>58,45</b>
<b>A. Dana Perimbangan</b>	<b>678.596,04</b>	<b>409.253,36</b>	<b>60,31</b>	<b>676.602,99</b>	<b>401.522,69</b>	<b>59,34</b>
1. Dana Transfer Umum	493.959,54	316.410,36	64,06	490.714,92	310.576,66	63,29
a. Dana Bagi Hasil	95.377,22	49.650,02	52,06	89.225,34	43.241,41	48,46
b. Dana Alokasi Umum	398.582,31	266.760,35	66,93	401.489,58	267.335,24	66,59
2. Dana Transfer Khusus	184.636,50	92.842,99	50,28	185.888,07	90.946,03	48,93
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	69.531,50	26.699,10	38,40	62.436,26	19.278,24	30,88
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	115.105,00	66.143,90	57,46	123.451,81	71.667,80	58,05
<b>B. Dana Insentif Daerah</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.434,38</b>	<b>52,17</b>
<b>C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY</b>	<b>20.243,29</b>	<b>6.503,56</b>	<b>32,13</b>	<b>21.059,58</b>	<b>6.817,87</b>	<b>32,37</b>
1. Dana Otsus	19.443,29	5.863,56	30,16	20.059,58	6.017,87	30,00
a. Prov. Papua dan Papua Barat	7.971,65	2.406,78	30,19	8.029,79	2.408,94	30,00
b. Provinsi Aceh	7.971,65	2.406,78	30,19	8.029,79	2.408,94	30,00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	<b>3.500,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>30,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>30,00</b>
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	<b>800,00</b>	<b>640,00</b>	<b>80,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.839,12</b>	<b>59,73</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.860,67</b>	<b>59,77</b>

# PEMBIAYAAN UTANG

Utang Pemerintah masih pada level aman 29,74 persen per PDB, didukung pengelolaan yang prudent dan akuntabel

	APBN 2018	Realisasi		% Growth (yoy)
		Juli 2018	% APBN	
<b>Pembiayaan Utang</b>	<b>399,22</b>	<b>205,57</b>	<b>51,49</b>	<b>-30,64</b>
<b>1. Surat Berharga Negara (Neto)</b>	<b>414,52</b>	<b>221,94</b>	<b>53,54</b>	<b>-27,86</b>
<b>2. Pinjaman (Neto)</b>	<b>(15,30)</b>	<b>(16,37)</b>	<b>107,01</b>	<b>45,51</b>
a. Pinjaman Dalam Negeri(Neto)	3,14	(0,08)	-2,65	-529,38
i. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	4,50	429,8	9,55	23,58
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN	(1,37)	(0,51)	37,66	56,21
b. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(18,44)	(16,29)	88,35	44,52
i. Penarikan Pinjaman Luar Negeri(Bruto)	51,35	23,23	45,24	-2,42
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN	(69,79)	(39,52)	56,63	12,66

Hingga akhir Juli 2018, realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp205,57 triliun dari Rp399,22 triliun yang ditetapkan pada APBN 2018 atau telah mencapai sebesar 51,49 persen APBN. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan negatif 30,64 persen. Pembiayaan utang ini diperoleh melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) maupun pengadaan Pinjaman.

SBN terdiri atas Surat Berharga Negara Konvensional atau Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/ Sukuk Negara) telah terealisasi

sebesar Rp221,94 triliun (53,54 persen APBN). Realisasi ini tumbuh negatif 27,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebagai upaya untuk menyelaraskan laju pertumbuhan utang dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Sukuk Negara sendiri pada bulan Agustus ini, telah mencapai 1 dasawarsa dalam penerbitannya. Peranan Sukuk Negara semakin penting dalam APBN, tidak hanya membiayai defisit secara umum namun juga membiayai kegiatan tertentu yang *earmarked*. Ulasan lengkap terkait Sukuk Negara dapat dibaca dalam artikel di edisi ini berjudul "Satu Dasawarsa Sukuk

Negara" dan "Sukuk Proyek Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Infrastruktur".

Sementara itu target Pinjaman ditetapkan sebesar negatif Rp15,30 triliun dan telah terealisasi sebesar negatif Rp16,37 triliun atau tumbuh positif 45,51 persen (yoy). Pinjaman Pemerintah terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Untuk pinjaman dalam negeri yang ditetapkan sebesar Rp3,14 triliun realisasinya mencapai negatif Rp83,3 miliar. Negatifnya realisasi pinjaman dalam negeri dikarenakan penarikan pinjaman dalam negeri yang dilakukan lebih kecil dari pada pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri. Adapun pinjaman dalam negeri yang dilakukan sampai dengan akhir Juli 2018 adalah sebesar Rp429,8 miliar sementara pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp513,0 miliar.

Di sisi lain, pinjaman luar negeri hingga akhir Juli 2018 telah terealisasi sebesar negatif Rp16,29 triliun dari Rp18,44 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2018 atau sebesar 88,35 persen APBN. Realisasi ini tumbuh positif 44,52 persen dibandingkan periode sama tahun 2017 yang terealisasi sebesar Rp11,25 triliun, dikarenakan

penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp23,23 triliun lebih kecil dibandingkan pembayaran cicilan pokok sebesar Rp39,52 triliun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mengurangi pinjaman luar negeri dalam rangka pengelolaan portofolio utang yang mengutamakan pengadaan utang dalam mata uang Rupiah.

Sementara itu, hingga Juli 2018, terdapat sebelas pinjaman luar negeri yang telah selesai masa perpanjangannya (*closed*) dan tidak diperpanjang karena proyek tersebut telah selesai dilaksanakan. Perjanjian pinjaman luar negeri ini dimaksudkan untuk pembangunan, perbaikan dan pengembangan proyek-proyek di berbagai lembaga dan kementerian. Proyek-proyek tersebut perpanjangannya ditandatangani antara tahun 2007 hingga tahun 2016, yakni sebagai berikut:

1. PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES (2007) dari pinjaman JICA sebesar JPY4.498,00 juta untuk PT. PLN,
2. DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA (2012) dari pinjaman JICA sebesar JPY14.526,00 juta untuk Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi,
3. COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR (I) (2009) dari pinjaman JICA sebesar JPY6.060,00 juta untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
4. DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGY (III) (2009) dari pinjaman JICA sebesar JPY5.659,00 juta untuk Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi,

5. WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM PHASE 2 (2011) dari pinjaman IBRD sebesar USD150,00 juta untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (SSWTP-ER) (2016) dari pinjaman Deutsche Bank sebesar EUR6,98 juta untuk untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6. REGIONAL ROADS DEVELOPMENT PROJECT (2012) dari pinjaman ADB-OF sebesar USD180,00 juta untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dalam perkembangannya, tanpa mengecilkan peran pinjaman luar negeri dan dalam negeri dari Lembaga Pemberi Pinjaman, peran SBN sebagai instrumen untuk menutup defisit APBN semakin penting. Dengan adanya divesifikasi instrumen utang ini, strategi pembiayaan melalui utang dilakukan secara hati-hati dengan memperhitungkan biaya, risiko dan kapasitasnya, serta memperhatikan prinsip-prinsip pruden, efisiensi biaya, produktivitas dan keseimbangan.
7. COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) (2012) dari pinjaman IFAD sebesar SDR15,87 juta untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Adanya peningkatan kepercayaan investor belakangan ini yang didukung oleh peningkatan peringkat kredit Indonesia menjadi layak investasi (*Investment Grade*), Pemerintah terus menerus melakukan pendalaman pasar keuangan dan perluasan basis investor, khususnya domestik. Pendalaman pasar domestik dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan (*resilience*) pasar dalam negeri dan memperbesar kapasitas investor yang masuk ke pasar, yang akhirnya akan berdampak menurunkan biaya utang. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga APBN 2018 untuk menjamin Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
8. COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) (2012) dari pinjaman IFAD sebesar EUR6,29 juta untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan,
9. STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID (2013) dari pinjaman AFD sebesar USD49,50 juta untuk PT. PLN,
10. SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PACKAGE 7: 500KV GIS EXTENSION KEMBANGAN AND 500KV & 150 KV CONVENTIONAL SUBSTATION MUARA TAWAR dari pinjaman AFD sebesar USD20,00 juta untuk PT. PLN, dan
11. SMALL SCALE WATER TREATMENT PLANT FOR EMERGENCY RELIEF

## Posisi Utang hingga akhir Juli 2018

(dalam Triliun Rupiah)

	Nominal	Growth (yoy)	%
<b>Juli-18</b>			
<b>Total Utang Pemerintah Pusat</b>	<b>4.253,02</b>	<b>12,51%</b>	<b>100,00%</b>
a. Pinjaman	785,49	6,87%	18,47%
1. Pinjaman Luar Negeri	779,71	6,87%	18,33%
Bilateral	323,79	3,21%	7,61%
Multilateral	411,19	10,77%	9,67%
Komersial	43,32	-0,87%	1,02%
Suppliers	1,40	56,32%	0,03%
2. Pinjaman Dalam Negeri	5,79	48,28%	0,03%
b. Surat Berharga Negara	3.467,52	16,18%	81,35%
1. Denominasi Rupiah	2.442,82	10,73%	57,44%
Surat Utang Negara	2.046,66	9,79%	48,12%
Surat Berharga Syariah Negara	396,16	15,82%	9,31%
2. Denominasi Valas	1.024,71	22,15%	24,09%
Surat Utang Negara	801,31	19,18%	18,84%
Surat Berharga Syariah Negara	223,40	34,14%	5,25%
Pendapatan Domestik Bruto**	14.302,21		
Rasio Utang thd PDB	29,74%		

\*\* Asumsi PDB hingga Juli 2018

Hingga akhir Juli 2018, Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan Rp14.302,21 triliun. Dengan jumlah PDB tersebut, rasio utang Pemerintah per akhir Juli tetap terjaga di bawah 30 persen atau sebesar 29,74 persen. Persentase tersebut masih jauh di bawah batas 60 persen terhadap PDB sebagaimana ketentuan Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

Komposisi utang Pemerintah pada akhir Juli 2018 terdiri dari pinjaman sebesar 18,33 persen dan SBN sebesar 81,35 persen. Sejalan dengan

pengutamaan pengadaan utang dari dalam negeri, khususnya melalui SBN, pertumbuhan SBN secara year-on-year lebih tinggi dibandingkan pinjaman. Secara umum sebenarnya instrumen pinjaman merupakan pelengkap bagi sumber pembiayaan utang Pemerintah. Khusus untuk pinjaman multilateral dan pinjaman yang berasal dari supplier dengan fasilitas kredit ekspor, pertumbuhannya masih di atas dua digit. Hal ini mengingat pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral masih dibutuhkan Pemerintah untuk memanfaatkan keuntungan dari transfer pengetahuan dan

teknologi serta tata kelola yang baik. Sedangkan pinjaman dengan fasilitas kredit ekspor masih diperlukan meskipun dalam jumlah yang kecil untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan, dimana terdapat kerja sama dengan lembaga pemberi fasilitas kredit ekspor, sehingga beban pembiayaannya dapat ditekan lebih murah.

Dari sisi instrumen SBN, Sukuk Negara khususnya yang berdenominasi Rupiah tercatat tumbuh secara year-on-year sebesar 15,82 persen. Tingginya pertumbuhan Sukuk Negara berdenominasi Rupiah salah satunya dipengaruhi oleh semakin berkembangnya peran Project Financing Sukuk (PFS) yang mulai diluncurkan Pemerintah pada tahun 2013 sebagai salah satu alternatif pembiayaan proyek selain dari pinjaman luar negeri. Sampai dengan tahun 2018, jumlah Kementerian dan Lembaga yang kegiatannya memperoleh pembiayaan dari PFS mencapai tujuh Kementerian dan Lembaga dengan total pembiayaan sekitar Rp22,53 triliun, antara lain untuk pembangunan jalur kereta api, sarana keagamaan, dan sarana pendidikan. Selain membiayai proyek-proyek tersebut, Pemerintah juga membiayai proyek pelestarian lingkungan hidup (green project) melalui penerbitan Green Global Sukuk yang telah dilakukan pada akhir Februari 2018.

Memperhatikan porsi SBN yang makin dominan dalam komposisi utang Pemerintah dan strategi untuk mengutamakan utang dari dalam negeri, Pemerintah berkomitmen untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Indonesia. Salah satu yang tengah dipromosikan Pemerintah saat ini adalah penerbitan SBN Ritel secara online. Pada penerbitan perdana SBN Ritel online di akhir bulan Mei 2018 dengan instrumen Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR003 berhasil dikumpulkan dana sebesar Rp1,93 triliun dari target awal sebesar Rp1 triliun. Besarnya dana yang berhasil dikumpulkan ini menunjukkan minat investor dalam negeri yang demikian besar, sehingga dalam waktu dekat Pemerintah kembali akan menerbitkan SBR dengan seri SBR004.

Dengan meningkatnya nominal utang, Pemerintah semakin berhati-hati dalam mengelola utang dengan berprinsip bahwa setiap Rupiah yang diperoleh melalui utang baik itu berupa pinjaman ataupun SBN, harus dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja pembangunan yang menghasilkan manfaat lebih besar dari biaya utangnya. Manfaat tersebut tidak hanya dari sisi finansial, namun juga manfaat ekonomis yang dampaknya dirasakan secara tidak langsung langsung (outcome) dan dalam jangka panjang.

Halaman Kosong

## BMN Sebagai Underlying Asset SBSN

Salah satu tujuan diterbitkannya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah membiayai Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Dalam penerbitan SBSN terdapat dua pendekatan yaitu pertama adalah SBSN yang berbasis proyek dan kedua, SBSN yang berbasis aset. Yang dimaksud proyek dalam hal ini adalah proyek pemerintah khususnya yang bersifat pelayanan kepada masyarakat (*public service*).

Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa Barang Milik Negara (BMN) yang dijadikan underlying asset tetap dapat digunakan oleh instansi yang bersangkutan. Hal ini karena hanya hak atas manfaat yang dijadikan underlying asset. Tidak ada pemindahan hak milik dan tidak dilakukan pengalihan fisik barang dalam penerbitan SBSN

dengan underlying asset sehingga tidak mengganggu tugas dan fungsi Pemerintah.

Dalam hal BMN sebagai underlying asset, SBSN yang diterbitkan menggunakan akad Ijarah. Dalam akad ijarah ini pembayaran imbalan (ujrah) atas penyewaan aset SBSN oleh pemerintah sebagai penyewa (mustajir/lessee) kepada pemegang SBSN selaku pemberi sewa (mu'jir/lessor) melalui agen pembayar (*special purpose vehicle*).

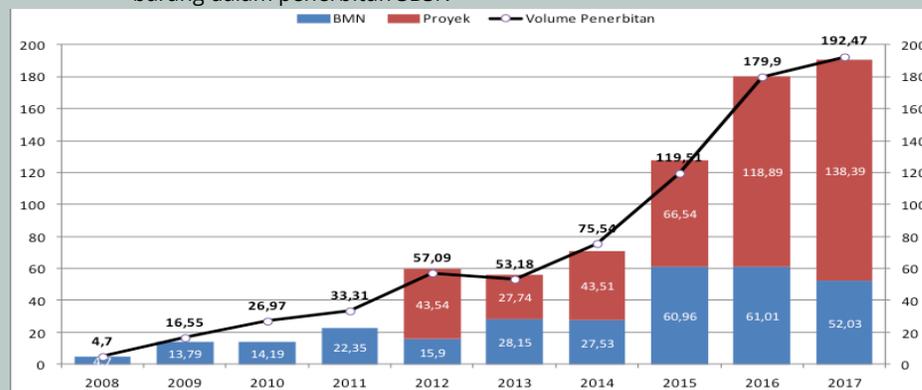
Perkembangan nilai BMN yang ditetapkan sebagai underlying asset penerbitan SBSN terus mengalami perkembangan sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2008. Trend nilai BMN yang ditetapkan sebagai underlying asset dari tahun 2008 s.d tahun 2017 disampaikan pada grafik sebagai berikut:

Dari grafik di atas, sejak tahun 2008 sd. 2011 BMN sebagai underlying asset digunakan sepenuhnya untuk penerbitan SBSN. Sedangkan rasio BMN sebagai underlying asset dibandingkan dengan SBSN yang diterbitkan adalah 100 persen (2008), 83 persen (2009), 53 persen (2010) dan 67 persen (2011). Sedangkan sejak tahun 2012 hingga 2017, underlying SBSN tidak lagi dimonopoli oleh BMN melainkan juga melibatkan proyek Pemerintah.

Selama tahun 2012-2017, total BMN yang dijadikan underlying asset SBSN adalah Rp 245,58 triliun atau rata-rata setahun Rp 49,12 triliun. Volume penerbitan SBSN yang

berbasis aset maupun proyek selama tahun 2012-2017 adalah Rp 677,69 triliun. Turunnya jumlah nilai BMN yang dijadikan underlying asset SBSN menandakan bahwa daya ungkit BMN (*leverage asset*) sangat tinggi.

Hal lain yang perlu digarisbawahi, adanya program nasional revaluasi BMN pada tahun 2017 dan 2018 mampu mendorong penggunaan BMN sebagai underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN secara lebih efisien. Efisiensi ini karena BMN yang dijadikan underlying asset masih menggunakan nilai sebelum revaluasi BMN tetapi mampu memberikan kontribusi optimal dalam penerbitan SBSN.



(Sumber: DJPPR, 2018)

## Realisasi APBN s.d. 31 Juli 2017 dan 2018

(dalam miliar rupiah)

URAIAN	2017			2018		
	APBN	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd APBN	APBN	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd APBN
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1,736,060.1</b>	<b>853,793.5</b>	<b>49.2%</b>	<b>1,894,720.4</b>	<b>994,357.5</b>	<b>52.5%</b>
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1,732,952.0	852,917.3	49.2%	1,893,523.5	991,087.4	52.3%
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1,472,709.9	680,680.3	46.2%	1,618,095.5	780,052.2	48.2%
a. Pajak Dalam Negeri	1,436,730.9	660,026.2	45.9%	1,579,395.5	754,722.4	47.8%
b. Pajak Perdagangan Internasional	35,979.0	20,654.1	57.4%	38,700.0	25,329.8	65.5%
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260,242.1	172,237.0	66.2%	275,428.0	211,035.2	76.6%
II. HIBAH	3,108.1	876.2	28.2%	1,196.9	3,270.1	273.2%
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>2,133,295.9</b>	<b>1,063,835.7</b>	<b>49.9%</b>	<b>2,220,657.0</b>	<b>1,145,656.1</b>	<b>51.6%</b>
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1,366,956.6	604,739.7	44.2%	1,454,494.4	697,020.5	47.9%
1. Belanja K/L	798,585.3	328,913.9	41.2%	847,435.2	375,930.5	44.4%
2. Belanja Non /L	568,371.3	275,825.8	48.5%	607,059.2	321,090.0	52.9%
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766,339.3	459,096.0	59.9%	766,162.6	448,635.6	58.6%
1. Transfer ke Daerah	706,339.3	423,256.9	59.9%	706,162.6	412,774.9	58.5%
2. Dana Desa	60,000.0	35,839.1	59.7%	60,000.0	35,860.7	59.8%
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(178,039.4)</b>	<b>(79,147.7)</b>	<b>44.5%</b>	<b>(87,329.5)</b>	<b>(4,853.8)</b>	<b>5.6%</b>
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)</b>	<b>(397,235.8)</b>	<b>(210,039.0)</b>		<b>(325,936.6)</b>	<b>(151,299.2)</b>	
% Surplus / (Defisit) Anggaran thd PDB	(2.92)	(1.56)		(2.19)	(1.02)	
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II+III+IV+V)</b>	<b>397,235.8</b>	<b>298,773.0</b>	<b>75.2%</b>	<b>325,936.6</b>	<b>206,598.3</b>	<b>63.4%</b>
I. PEMBIAYAAN UTANG	461,343.6	296,396.6	64.2%	399,219.4	205,567.7	51.5%
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(59,733.8)	(125.0)	0.2%	(65,654.3)	(1,550.0)	2.4%
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(3,668.7)	2,240.4	-61.1%	(6,690.1)	2,474.0	-36.98%
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1,005.4)	-	0.0%	(1,121.3)	-	0.0%
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	300.0	261.0	87.0%	183.0	106.6	58.3%
KELEBIHAN / (KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	88,734.0		-	55,299.1	

Halaman Kosong



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA